

PENETAPAN RENJA TAHUN 2026

**RANCANGAN AKHIR RENCANA
KERJA DINAS KELAUTAN &
PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK**



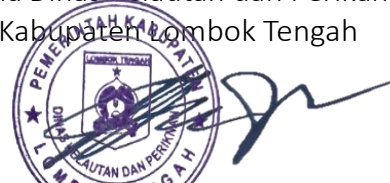
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Dokumen Penetapan Rencana Kerja (Penetapan RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026 (Penetapan Renja Dislutkan TA.2026).

Penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja pembangunan bidang/sector kelautan dan perikanan pada tahun anggaran 2026. Penetapan Renja Rencana Kerja OPD ini memuat gambaran tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan tahun 2026. Sangat disadari Dokumen Penetapan Rencana Kerja ini masih memerlukan penyempurnaan, sehingga saran dan kritik untuk perbaikan sangat diperlukan.

Akhirnya, Semoga Dokumen Penetapan Rencana Kerja tahun 2026 ini dapat dijadikan panduan untuk melaksanakan kegiatan sehingga cita-cita pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan Masyarakat Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah yang sejahtera dapat tercapai.

Praya, 25 Nopember 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Lombok Tengah



H. NURJAMAN, SP, MM

Pembina Utama (IV/c)

Nip. 19681231 199710 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.LOTENG TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memenuhi amanat Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah, bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja. Rencana kerja adalah dokumen Rancangan rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapaisasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah adalah dokumen perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk periode 1(satu) tahun.

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah(RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 – 2029 dan masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Secara fungsional Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya, baik yang terkait dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem pengelolaan keuangan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2005 - 2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 7).

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencar Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-20 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8)
12. Peraturan daeran Nomor : 1 Tahun 2020 Tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 – 2023.
13. Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja.
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026
15. Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil verifikasi , validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah.
17. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan maupun anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026.

Tujuan penyusunan Dokumen Penetapan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026, adalah :

- a. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2026, yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029, serta Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029;
- b. Menjabarkan sasaran, indikator, program, dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat Perikanan, nelayan, dan pembudidaya ikan serta pemasar dan pengolah hasil perikanan;
- c. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RKT SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan

awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan Propinsi dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Beberapa penjelasan yang perlu ditampilkan dalam perumusan program dan kegiatan yaitu:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi:
3. Penjelasan Jika Rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) baik jenis program / kegiatan

, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

4. Tabel rencana Program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan perangkat daerah tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 kabupaten Lombok Tengah.

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan								
	Program.....								
	Kegiatan.....								
	Subkegiatan.....								

BAB V PENUTUP

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

2.1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

2.1.1. Capaian Anggaran Tahun Anggaran 2024 Dan Capaian Renstra SKPD

Total pagu Anggaran Pelaksanaan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP-APBD) yang dialokasikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 senilai Rp. 10.523.466.263,- terdiri dari Belanja Langsung senilai Rp. 5.964.384.869,- terealisasi sebesar Rp. 5.791.599.021,- atau (97,10%) dan Belanja Tidak Langsung Rp. 4.559.081.394,- realisasinya sebesar Rp.4.521.764.724,- atau (99,18%).

Secara umum seluruh kegiatan yang diprogramkan Tahun 2024 dapat direalisasikan dan dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari hasil realisasi penyerapan APBD sesuai dengan Laporan Pelaksanaan Program/kegiatan DPA-APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan 31 Desember 2024 secara keseluruhan sebesar Rp. 10.313.363.745,- atau mencapai 98,00% dengan realisasi fisik sebesar 99,98%.

Jumlah program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 terdiri atas 4 (empat) program dengan 14 (Empat Belas) kegiatan dan 31 Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah di Tahun 2024.

Sisa anggaran APBD yang tidak dimanfaatkan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 210.102.518,- atau sebesar 1,20% merupakan hasil efisiensi penggunaan anggaran yang selanjutnya dikembalikan ke Kas Daerah. Alokasi anggaran untuk program/kegiatan yang mendukung secara langsung sasaran strategis dan indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah TA. 2024 berjumlah Rp. 5.964.384.869,- yang berasal dari APBD Kabupaten dengan sumberdana Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 3.897.984.869,- dan Dana alokasi Khusus (DAK Fisik) sejumlah Rp. 2.066.400.000,- Rincian anggaran tersebut sesuai program/kegiatan

pendukung perjanjian kinerja Tahun 2024.

Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.1 Berikut ini:

Tabel. 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Dan Pencapaian Renstra Dinas Kelautan Dan Perikanan Sampai Dengan Tahun 2025 Kabupaten Lombok Tengah.

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Atau/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun 2025) (N-1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023 (N-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (Tahun 2025 (n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	BB	B	BB	100%	B		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran Dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun	7 Dokumen	14 Dokumen	7 Dokumen	39 Dokumen	557%	7 Dokumen	60 Dokumen	8,57
A	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencana	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200%	1 Dokumen	5 Dokumen	5
B	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Yang Tersusun	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200%	1 Dokumen	5 Dokumen	5

	C	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Yang Tersusun	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	5
	D	Sub Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Yang Tersusun	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	5
	E	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Yang Tersusun	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	300%	1 Dokumen	6 Dokumen	5
	F	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	12 Lporan	19 Dokumen	158%	1 Dokumen	22 Dokumen	5
	G	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Laporan	11 Dokumen	1100%	1 Dokumen	14 Dokumen	5
	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Yang Tersusun	25 dok							
	A	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN	12 Bulan	14 Bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	38 Bulan	3,17
	B	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	2 Dokumen	1 laporan	1 laporan	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	4
	C	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester/SKPD	Jumah Laporan Keuangan Bulanan	12 Dokumen	24 Dokumen	12 bulan	12 laporan	100%	12 Dokumen	48 Dokumen	4
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi (Jenis)								
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Yang Tersedia (Jenis)	1 Jenis	7 Jenis	1 jenis/paket	1 paket	100%	1 Jenis	9 Jenis	9
	2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	9 Jenis	23 Jenis	5 jenis/paket	5 paket	100%	14 Jenis	42 Jenis	4,67
	3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia (Jenis)	5 jenis	4 Jenis	-	0	0%	4 Jenis	8 Jenis	1.6
	4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistic Kantor	Jumlah Logistic Yang Tersedia (Bln)	12 Bulan	17 Bulan	12 bulan	12 paket	100%	12 bulan	41 Bulan	3.42

5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia (Bulan)	12 bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 Bulan	3
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	15 Laporan	10 Laporan	10 laporan	100%	17 Laporan	42 Laporan	2.1
3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Yang Tercatat (Jenis)								
A	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel Yang Tersedia	3 Unit	2 Unit	0	0	0%	2 paket	4 unit	1.33333333
B	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin (Unit)	2 unit	2 Unit	0	0	0%	9 unit	11 unit	5.5
C	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Pendukung Gedung Kantor (Unit)	1 unit	1 unit	0	0	0%	0	1 unit	1
D	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	0	0	0	0%	1 unit	1 unit	1
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan Pemerintah Daerah (Bln)			12 Laporan					
A	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Layanan Internet (Mega Byte)	20 MB	40 MB	40 MB	40 MB	100%	20 MEGABYTE	100 MB	5
		Layanan Air (M3)	753 M3	1.853 M3	1.853 M3	1.853 M3	100%	1100 M3	4.806 M3	6.38247012
		Layanan Listrik (Kwh)	135600 Kwh	373.100 Kwh	373.100 Kwh	373.100 Kwh	100%	237.500 Kwh	983.7Kwh	0.00725
B	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan Umum Kantor (Bln)	12 Bulan	24 Bulan	24 Bulan	24 Bulan	100%	12 Bulan	60 Bulan	5
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BMD Dalam Kondisi Baik (Jenis)								
A	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara (Unit)	63 Unit	98 Unit	64 unit	64 unit	100%	55 unit	217 unit	3.44444444
		Surat Kendaraan Bermotor	54 Unit	117 Unit		54 unit	84,4%	55 Unit	226 unit	4.185185185
		Bahan Bakar dan Pelumas	9.132, 12 Liter	18.522,12 Liter	18.522,12 Liter	18.522,12 Liter	100%	5.544 Liter	42.588,24 Liter	4.663565525

B	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Dan Peralatan Mesin Yang Diservice (Unit)	10 unit	15 Unit	10 unit	10 unit	100%	13 Unit	38 unit	3.8
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara (Unit)	1 unit	3 Paket	1 unit	1 unit	100%	1 unit	5 paket	5
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Yang Terpelihara (Unit)	8 Unit	16 Unit	8 Unit	8 unit	100%	10 unit	34 unit	4.25
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (TON)	3,438.69	5.505 ton	3.589,21	7.531,55	209,84	3438,69 ton	16.475,24 ton	4.791138486
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Yang Tersedia (Unit/Paket)	126 unit/paket	678 Unit	112 unit	167 unit	149.1	126 unit/paket	971 unit/paket	7.706349206
	Sub Kegiatan Penyediaan Dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Publikasi Data Statistic Perikanan Tangkap (Dokumen)	12 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	48 dokumen	4
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Perikanan Tangkap Yang Tersedia (Unit/Paket)	34 Unit	627 Unit	37 unit	55 unit	115,38%	24 unit	706 unit	20.76470588
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Unit/Paket)	92 unit	137 Paket	75 unit	112 unit	149,33%	375 unit	624 unit	2,32
	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kelompok Kelas (KUB) dan penumbuhan KUB baru	97 KUB	76 KUB	71 kelompok	71 kelompok	100%	70 KUB	217 KUB	2.237113402
			24 KUB		16 kelompok	16 kelompok	100%	25 kelompok	57 kelompok	2.375
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya (Orang)	35 Kelompok	38 Kelompok	25 kelompok	25 kelompok	100%	350 org	98 KUB	2.8

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Penguatan Kelembagaan Nelayan	38 Kelompok	57 Kelompok	25 kelompok	25 kelompok	100%	25 kelompok	107 Kelompok	2.815789474
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kelompok Nelayan/Nelayan Yang Mendapat Akses Permodalan	24 Nelayan	23 Nelayan	15 nelayan	15 nelayan	100%	20 unit usaha	58 unit	2.416666667
	Kegiatan Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Ikan Yang Dilelang (Ton)	936.42 ton	100,33 Ton	740,2 ton	431,86	58,34%	936.42 ton	1.468,61 ton	1.568324043
	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka penyelenggaraan TPI (layanan)	36 Layanan	7 Paket	12 layanan	12 Layanan	100%	36 layanan	55 layanan	1.527777778
	Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Yang Beroperasi Di Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diushakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal Perikanan Ukuran Sampai Dengan 10 GT (Dokumen)			504 rekomendasi	505 Rekomendasi	100,20%	260 rekomendasi	765 rekomendasi	1.241883117
	Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah rekomendasi Pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP) Berukuran Sampai Dengan 10 GT (Dokumen)	616 rekomendasi	450 Dokumen	504 rekomendasi	505 rekomendasi	100,20%	260 rekomendasi	1.215 rekomendasi	1.972402597
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKSI PEIKANAN BUDIDAYA (TON)	47.653.94 ton	45.143,86 Ton	49.235,16 Ton	49.102.15 Ton	99,73%	47,053.94 ton	141.299,95 ton	2.965126283
		Produksi Benih Ikan (Ekor)	7.462.100 ekor	22.661.000 Ekor	8.242.643 ekor	11.765.000 ekor	142,73%	9,003,777 ekor	43.429.777 ekor	5.820047574
1	Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Perikanan Dibidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Dokumen Pelayanan Perijinan Perikanan Budidaya (Dokumen)	9 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0%	1 dokumen	2 Dokumen	0.222222222

	Sub Kegiatan Penetapan Dan Prosedur Penerbitan Ijin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya, Lokasi Dan/Atau Manfaat Atau Dampak Negatifnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif Dan Intensif Serta Tidak Menggunakan Modal Asing Dan/Atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah SOP Perijinan Perikanan Budidaya (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0%	1 dokumen	2 Dokumen	2
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Menerapkan Teknologi Budidaya Perikanan (Kelompok)	3 kelompok	4 Kelompok	0	0	0	5 kelompok	9 Kelompok	3
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Meningkatnya Pengetahuan Dan Keterampilan Pembudidaya Ikan (Orang)	30 Org	110 Org	0	0	0%	50 orang	160 orang	5.33333333
	Sub Kegiatan Pelaksanan Fasilitas Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidayaan Ikan Kecil	Terfasilitasinya Pembentukan Dan Pembinaan Pokdakan	40 pokdakan	5 Kelompok	0	0	0%	20 kelompok	25 kelompok	0.625
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Pokdakan Yang Mendapatkan Akses Permodalan	15 pokdakan	5 Kelompok	0	0	0%	12 kelompok	17 kelompok	1.13333333
	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah Pembudidaya Yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	90 org	2.950 orang	0	0	0.00%	400 orang	3.350 orang	37.22222222
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) Dokumen	600 dokumen	600 Dokumen	600 dokumen	600 Dokumen	100%	600 dokumen	1800 Dokumen	3
	Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan Dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SOP Penerbitan TDPIK Di Kabupaten Lombok Tengah	1 dokumen	1 Dokumen	0	0	0%	1 rekomndasi	2 Dokumen	2
	Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan TDPIK Di Kabupaten Lombok Tengah (Dokumen)	600 dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	100%	600 dokumen	1800 Dokumen	3

		Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pembudidaya Ikan Yang Tersedia (Unit)	382 unit/paket	470 Unit	367 unit	282 unit	76,84%	282 unit	1.034 Unit	2.706806283
		Sub Kegiatan Penyediaan Data Dan Informasi Pembudidaya Ikan Kecil Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Publikasi Data Dan Informasi Bidang Usaha Budidaya (Dokumen)	2 Dokumen	4 Dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	4.5
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Prasarana Budidaya Ikan (Unit/Paket)	87 Unit	95 Unit	4 unit	4 unit	100%	14 unit	113 unit	1.298850575
		Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidaya Ikan Yang Tersedia (Unit/Paket)	249 Unit	711 Unit	278 unit	278 unit	131,25%	380 unit	1.369 unit	5.497991968
		Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Uji Sample Kesehatan Ikan	8 dokumen	1 Sampel	1 sampel	7 sampel	700%	12 uji sampel	20 sampel	2.5
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton)	4863,97 ton	4.589,07 Ton	4.675,10 ton	4.713.14 ton	100,81%	4.863,97 ton	14.166,18 ton	3.086939184
			Meningkatnya Produksi Garam Rakyat (Ton)	3613,53 ton	974,6 Ton	3.542,33 ton	3.680.28 ton	103,89%	3.613,53 ton	8.268,41 ton	2.288180809
		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah Rekomendasi Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Yang Difasilitasi Penerbitannya (Dokumen)	12 dokumen	10 Dokumen	12 dokumen		0%	12 dokumen	22 Dokumen	1.833333333
		Sub Kegiatan Penyediaan Data Dan Informasi Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan (Dokumen)	12 Dokumen	30 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 dokumen	54 Dokumen	4.5
		Kegiatan Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah Pengujian Produk Olahan Hasil Perikanan (Dokumen)	4 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 dokumen	12 Dokumen	3
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah Unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yg mendapatkan binaan terhadap penerapan persyaratan perijinan berusaha pada pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko (Unit Usaha)	56 kelompok	30 Kelompok	60 unit usaha	60 pelaku usaha	100%	56 unit usaha	146 unit usaha	2.607142857

	Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industry Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ikan Dan Garam Yang Tersalurkan Sebagai Bahan Baku Industry (Ton)	49033 ton	50.586,26 Ton	47.130 ton	47.135 ton	111,67%	49.033,00 ton	146.754,26 ton	2.992969225
	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi\	39 Pelaku Usaha	56 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	50 pelaku usaha	100%	70 pelaku usaha	176 paket	4.512820513
Jumlah:										

Praya , 25 Nopember 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Lombok Tengah,



H. NURJAHMAN, SP,MM
NIP. 19681231 199710 1005

▪ **Realisasi program /kegiatan yang kurang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;**

Capaian Program/kegiatan pada tahun anggaran 2024 yang realisasi kinerjanya masih belum mencapai target adalah

1. Pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah subkegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor pada item belanja Langganan jurnal/Surat Kabar/Majalah pada tahun 2024 hanya terealisasi sebesar 46,57% atau senilai Rp.1.425.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp.3.60.000,- tidak terserapnya anggaran semuanya karena Jumlah Langganan koran yang tadinya (tahun sebelumnya) berlangganan 3 jenis koran di tahun 2024 hanya 1 jenis koran lokal yaitu Radar Mandalika saja sehingga terdapat kelebihan anggaran. Masih pada Program yang sama di Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada item belanja Tagihan Air, Listrik dan Internet tidak terserap 100% hanya 77% hal ini disebabkan karena :
 - 1) Untuk Tagihan Listrik karena Pemakaian Lebih Rendah dari Estimasi atau pemakaian lebih rendah dari perkiraan yang menyebabkan saldo tersisa, yang tadinya di tahun sebelumnya terjadi pemakaian yang tinggi sehingga pada saat APBD Perubahan di tahun 2024 di lakukan penambahan pagu pada belanja listrik coldstorage .
 - 2) Belanja Tagihan Air dana tidak terserap semuanya karena pada Bangsal Perikanan hanya membayar biaya beban air saja karena selama tahun 2024 tidak ada aktifitas seperti pelatihan dan lain-lain.
 - 3). Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah subkegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di Item belanja Kendaraan Bermotor /Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) realisasi anggaran tidak terserap semua hal ini disebabkan karena adanya kondisi kendaraan bermotor yang rusak berat yang tidak di bayarkan pajaknya karena menunggu proses lelang selain itu hilang nya Surat Pajaknya sehingga tidak dapat dibayarkan sementara setiap tahunnya harus tetap diusulkan untuk

dibayarkan pajaknya sehingga tiap tahunnya tetap di anggarkan biaya pajaknya, karenanya anggaran tidak terserap semuanya. Sementara pada item belanja bahan bakar pelumas/BBM tidak terserap semuanya karena adanya efisiensi pemakaian dan operasional pada pemakaian BBM dengan penerapan strategis hemat energi dari beberapa kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan Roda 2 (dua) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota di Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil terdapat item belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk perjalanan dinas kelaura daerah dalam rangka finalisasi kegiatan DAK Fisik Tahun 2025 di Jakarta. Anggaran tidak terserap semuanya hal ini disebabkan karena yang semula anggaran selama 4 hari hanya digunakan selama 3 hari sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 4.062.035,-
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada Indikator Programnya yaitu meningkatnya produksi perikanan budidaya, dari target produksi sebesar 46.086,13 Ton terealisasi sebesar 46.125,47 Ton atau 100,09% hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yaitu :
 - a. Produksi perikanan budidaya air payau
Pada budidaya udang vanamei tidak mencapai 100% di sebabkan karena terjadinya anomaly cuaca ekstrim yang akibatnya menyebabkan timbulnya penyakit pada udang vanamei yang dibudidayakan karenanya berdampak pada target size panen dan tidak tercapainya PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah. Akibat penyakit APD Tersebut memnyebabkan udang banyak makan tapi pertumbuhan udang tidak ada sehingga udang dalam kondisi kurus/kecil.
 - b. Produksi perikanan Budidaya Air Tawar
Target Produksi perikanan budidaya dari sektor perikanan air tawar tidak tercapai disebabkan karena :
 - ✚ Dampak dari kemarau panjang (El Nino) sehingga berpengaruh pada produksi perikanan air tawar

✚ Adanya pemeliharaan jaringan/saluran irigasi utama dibagian utara yang menyebabkan Sebagian besar pembudidaya ikan tidak dapat melakukan aktifitas budidayanya karena hal tersebut diatas yang berdampak pada turunnya produksi perikanan budidaya dari kegiatan budidaya air tawar. Perbaikan saluaran utama ini sejak tahun 2023 hingga 2024 akhir. Yang berdampak pada capaian produksi perikanan.

▪ **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;**

Pada semua program kinerja yang telah dicapai rata-rata sebesar 90 - 100 %. Dengan terpenuhinya hampir seluruh program/kegiatan yang telah direncanakan (realisasi fisik pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar 99,89%), maka diharapkan hal ini dapat berimplikasi pada peningkatan layanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah kepada masyarakat dalam memenuhi Tujuan Program/kegiatan seperti yang tertuang pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah (2021 – 2026), yaitu meningkatnya Kontribusi Kelautan dan Perikanan pada PDRB

▪ **Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/Keluaran yang di rencanakan**

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat program/kegiatan yang melebihi target yang direncanakan, walau pada tahun anggaran 2024 terjadi deficit anggaran yang mengakibatkan penyesuaian target sesuai dengan yang dapat dicapai dalam kondisi tersebut.

Adapun Program/Kegiatan yang melebihi target yang sudah direncanakan adalah:

✚ Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Kegiatan :

- 1) Kegiatan Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, rawa dan genangan air lain nya yang dapat diusahakan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerjanya adalah Jumlah Rekomendasi kapal perikanan ukuran sampai dengan 10 GT yang tersedia dari target yang direncanakan 250 rekomendasi surat kapal terealisasi sebanyak 260 rekomendasi surat kapal.dengan

capaian kinerja sebesar 104%. Sehingga berdampak pada semakin berkurangnya nelayan yang tertangkap di Tengah laut akibat tidak memiliki dokumen kapal perikanan. Disamping itu karena tingginya tingkat kesadaran nelayan akan arti pentingnya Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP) bagi pengembangan usahanya sehingga nelayan secara mandiri datang ke gerai pas kecil yang dilaksanakan di kecamatan pujut di fasilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Tengah dan Kerjasama dengan KSOP Lembar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

- 2) Kegiatan Pengelolaan penangkapan ikan diwilayah Sungai, Danau, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerjanya Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan yang tersedia, dari target 119 unit/paket terealisasi sebanyak 144 unit dengan capaian kinerja sebesar 110% hal ini memberikan dampak pada peningkatan produksi perikanan tangkap yang melebihi target produksi dari yang direncanakan yaitu sebesar 3.975,10 Ton terealisasi sebesar 4.084,14 Ton atau 102,17%.

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Indicator kinerja dari kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan adalah Jumlah sarana dan prasarana pembudidaya ikan yang tersedia (Unit) dengan target 374 unit terealisasi 395 unit atau 105,61%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan sarana dan prasarana pada kegiatan yang bersumber dari dana Alokasi khusus dan pokir melalui dana alokasi umum (DAU) melalui Perubahan-APBD 2024. Hal ini berdampak pada peningkatan produksi perikanan budidaya .Selain itu pada sub kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya ikan dalam 1 daerah Kabupaten/kota dengan indicator Jumlah sarana pembudidaya ikan dari target 81 unit terealisasi 89 unit atau 109,9% hal ini disebabkan karena adanya penambahan sarana dan prasarana pada kegiatan yang bersumber dari dana Alokasi khusus dan pokir melalui dana alokasi umum (DAU) melalui Perubahan APBD tahun 2024. Dan berdampak pada peningkatan produksi perikanan budidaya.

🚦 Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

1. Indikator Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah meningkatnya produksi pengolahan hasil perikanan dengan target 4768,60 Ton terealisasi 4834,23 Ton atau Capaian realisasi kinerja sebesar 101,38% hal ini disebabkan karena geliat dari para pelaku usaha pengolah hasil perikanan (POKLAHSAR) karena adanya bantuan pemerintah berupa peralatan pengolahan hasil perikanan dan promosi melalui lomba masak ikan dan pameran kelautan dan perikanan serta sosialisasi Gerakan Makan Ikan nasional yang dilaksanakan di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah bekerja sama dengan organisasi PKK Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan sosialisasi secara road show hal ini dilakukan guna mencegah /menekan stunting terutama pada ibu hamil dan balita .sehingga berdampak pada meningkatnya produksi pengolahan hasil perikanan
 2. Pada tahun ini terjadi musim la-nino Dimana kemarau Panjang hal ini memberi dampak positif pada produksi garam rakyat yang sangat mengandalkan dari sinar matahari, pada proses produksinya hal tersebut berdampak pada meningkatnya produksi garam rakyat dari target garam sebesar 3577,75 Ton terealisasi sebesar 3815,21 Ton dengan capaian kinerja sebesar 106,64 %. hal ini memberikan dampak yang sangat signifikan pada peningkatan produksi perikanan garam rakyat yang melebihi target produksi dari yang direncanakan
- **Tidak tercapainya target berdasarkan renstra SKPD tahun 2021-2026 di sebabkan oleh:**
1. Pada Tempat Pelelangan ikan tidak tercapai sesuai target renstra yang telah ditetapkan karena TPI belum optimal berfungsi dan masih taraf percobaan di samping itu sarana dan prasarana TPI belum memadai dan masih kurang promosi sehingga berdampak pada target yang tidak tercapai di tahun 2024.
 2. Karena tahun 2024 ini terjadi Musim angin barat yang menyebabkan Sebagian besar nelayan tidak berani turun melaut sehingga berdampak pada Capaian kinerja Program/Kegiatan pengelolaan perikanan tangkap.

▪ **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.**

1. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait agar program dan kegiatan bisa berjalan sinergi;
2. Melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap pembudidaya ikan agar dapat mengatasi atau meminimalisir permasalahan terhadap kemarau yang ekstrim Untuk mengatasi dampak dari kemarau ekstrim tersebut dengan cara memperketat dan mengawasi pengaturan pola tanam (waktu produksi);
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan;
4. Meningkatkan sinkronisasi anggaran daerah dengan kebijakan pusat dan provinsi, agar ada optimalisasi sumber pendanaan.
5. Meningkatkan alokasi anggaran pada program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat
6. Peningkatan Kapasitas SDM dan Penguatan Tata Kelola
7. Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan yang Lebih Ketat
8. Melakukan penyesuaian target dan strategi dalam perencanaan tahunan (Renja) agar ditemukan ketidak sesuaian dengan kondisi riil di lapangan.
9. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah harus gencar melakukan promosi TPI baik melalui media cetak dan elektronik

2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan yang tertuang didalam renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

Pada tahun 2024, pembangunan bidang kelautan dan perikanan khususnya diprioritaskan pada tujuan untuk meningkatnya

kontribusi kelautan dan perikanan pada PDRB . Hasil penilaian kinerja tersebut tertuang sebagai berikut :

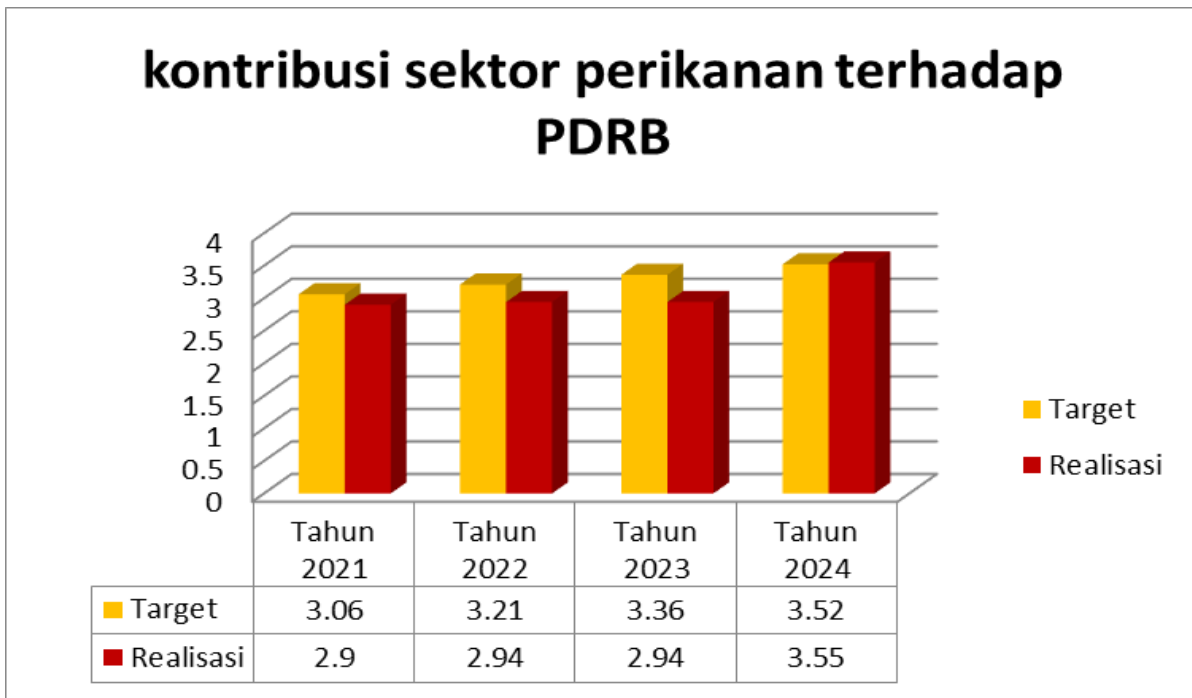
1. Meningkatnya Produksi Perikanan dengan indikator kinerja yaitu: Produksi Perikanan yang dihitung dalam satuan ton. Produksi perikanan diperoleh dari Kompilasi Data Statistik Produksi Perikanan Budidaya dan Kompilasi Data Statistik Perikanan Tangkap di 12 Kecamatan (ton). Capaian Produksi Perikanan Tahun 2024 sebesar 50.209,65 ton terdiri dari Produksi perikanan budidaya tahun 2024 sebesar 46.125,47 ton (100,09%) ton dan produksi perikanan tangkap sebesar 4.084,18 Ton (102,74%) .
2. Berdasarkan perhitungan estimasi tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 capaian Angka konsumsi ikan Kabupaten Lombok Tengah Angka konsumsi ikan yang dirilis terakhir adalah sebesar 40,10 Kg/Kapita/Tahun oleh BPS (Ket: Angka sangat sementara)
3. kontribusi sector kelautan dan perikanan pada PDRB tahun 2024 sebesar 3,55% (Data BPS Lombok Tengah) hal ini naik bila dibandingkan dari tahun sebelumnya tahun 2021 yaitu 2,94% atau terjadi kenaikan sebesar 0,61%. Kontribusi dari sektor Kelautan dan Perikanan Lombok Tengah tiap tahun nya cenderung tren positif (Naik) .

Secara umum hasil evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada Tabel dan Grafik berikut ini;

Tabel Capaian PDRB pada sekator Kelautan dan Perikanan dari tahun 2021 – 2024

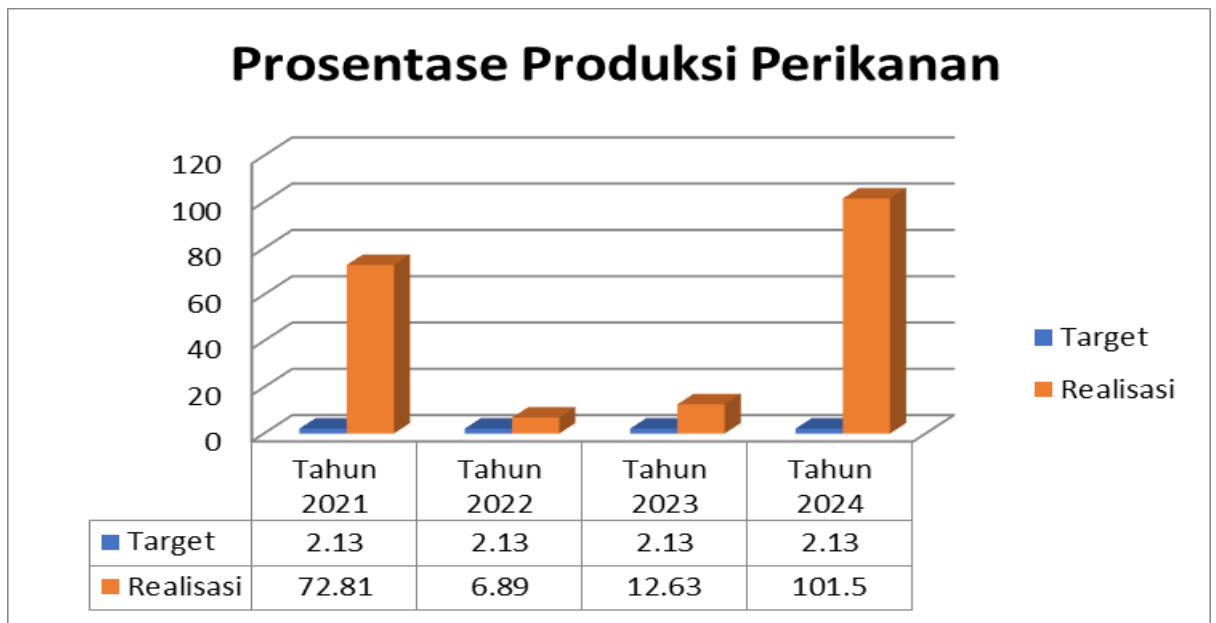
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi pada Awal kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Kelautan dan Perikanan										
1	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	(%)	2,93	3,06	2,90	3,21	2,94	3,36	2,94	3,52	3,55

Gbr. Grafik Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB dari tahun 2021 – 2024



Dari table dan Grafik diatas dapat terlihat tiap tahunnya kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan pada PDRB di Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2021 -2024 (trend positif) hal ini disebabkan karena :

- 1) terjadi peningkatan produksi perikanan tiap tahunnya
- 2). Permintaan Pasar yang meningkat terhadap produks ikan
- 3). Adanya Dukungan Pemerintah
- 4). Penggunaan Teknologi dan
- 5). Diversifikasi Produk.



Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah

No	Indikator Kinerja berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	PM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun				Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase kontribusi PDRB sector perikanan			3.06	3.21	3,36	3,52	3,68	2,9	2,94	2,94	3,55	3,68	3,85	
	Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (Ton)			2.50	2.50	2.50	2.50	2,50	72,905	61.32	64,11%	2,74	2,50	2,50	
2	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)			3.115,28	3.193,16	3.272,99	3.354,82	3.438,69	3.584,897	5.151,222	7.544, 97 Ton	4.084,18 ton	3.438,69	3,524.66	
3	Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (Ton)			2.10	2.10	2.10	2.10	2,10		2,13	4,82%	2,18	2,10	2,10	
4	Produksi Perikanan Budidaya (Toon)			43.300,51	44.209,82	45.138,22	46.086,13	47.053,9 4	75.563,41	45.143,86	49,102.152 Ton	46.125,4 7	47.053,94	48,042.07	
5	Produksi Benih Ikan (Ekor)			7.462,100	7.842,667	8.242,643	8.623,210	9.003.77 7	10.916,000	11.741.000	11.765.000 ekor	11.808.0 00 ekor	9.003.777	9,384,344	
6	Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (%)			2.0	2.0	2.0	2.0	2,0	2.0	2,12	2,63%	2,57	2,0	2,0	

7	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton)			4.493,56	4.583,43	4.675,10	4.768,60	4.863,97	4.505,64	4.589,07	4713.14 Ton	4834,23 Ton	4.863,97	4,961.25	
8	Produksi Garam (Ton)			3.472,53	3.507,26	3.507,26	3.577,75	3.613,53	2.763,24	974,6	3680.28 Ton	3815,21 ton	3.613,53	3,649.67	
9	Persentase Capaian Realisasi PAD Terhadap Target (%)			100	100	100	100	100	89.98	65,79	40,78%	63,80 %	100	100	

Akuntabilitas Kinerja Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah

No	Nama SKPD Program dan Kegiatan	Jumlah Pagu (Rp)			Realisasi (Rp)			Rasio Antar Pagu dan Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022 (4/1)	2023 (5/2)	2024 (6/3)
I	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36,150,976	21,943,949	50,504,648	33,162,416	21,865,500	50,500,393	0.917331139	0.996425028	0.99991575
2	Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,538,561,099	4,096,454,494	4,583,367,601	4,183,316,739	4,021,802,361	4,546,038,824	0.921727536	0.981776404	0.9918556
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	128,608,048	116,325,002	71,006,947	87,323,637	97,042,744	68,305,742	0.678990455	0.83423806	0.961958581
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	271,772,968	190,157,348	284,332,452	251,395,349	163,897,016	249,051,171	0.925019699	0.861902092	0.875915391
5	Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	19,722,315	0	30,207,190	19,720,600	-	28,767,000	0.999913043	0	0.95232294

6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	167,777,278	167,951,615	166,590,655.00	145,974,668	151,468,111	145,034,078.00	0.870050282	0.901855639	0.870601523
	JUMLAH	5,162,592,684	4,592,832,408	5,186,009,493	4,720,893,409	4,456,075,732	5,087,697,208	0.914442354	0.970223892	0.981042787
1	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat di usahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,137,836,585	21,276,112	22,085,340.00	1,106,238,070	21,233,610	21,951,750.00	0.972229303	0.998002361	0.993951191
2	Kegiatan Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di sungai, Danau, waduk, Rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 daerah kabupaten/kota	12,811,950	28,850,324	29,609,646.00	12,776,900	28,464,500	29,477,600.00	0.997264273	0.986626701	0.99554044
	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	772,077,845	1,752,084,028	820,046,647.00	754,842,100	1,738,586,810	814,356,615.00	0.977676156	0.992296478	0.993061331
3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	15,843,705	93,410,280	19,544,216.00	15,836,900	93,153,850	19,490,450.00	0.999570492	0.997254799	0.997249007
	JUMLAH	1,938,570,085	1,895,620,744	891,285,849	1,889,693,970	1,881,438,770	885,276,415.00	0.974787543	0.992518559	0.993257568
1	Penerbitan izin usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	6,328,100	0	0	6,147,000	-	0	0.971381615	0	0
2	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	26,407,260	0	0	19,441,400	-	0	0.736214208	0	0
3	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	13,670,560	0	0	6,560,200	-	0	0.479877927	0	0
4	Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan	5,968,945,515	2,150,640,993	3,885,772,048	5,805,774,094	2,135,174,100	3,790,770,506.00	0.972663275	0.99280824	0.975551437
	JUMLAH	6,015,351,435	2,150,640,993.00	3,885,772,048	5,837,922,694	2,135,174,100	3,790,770,506	0.970504011	0.99280824	0.975551437

1	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha skala mikro dan Kecil	30,000,100	17,702,109.00	20,899,790.00	16,261,040	13,924,460	20,792,740.00	0.54203286	0.78659893	0.994877939
2	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	153,547,763	105,870,959.00	224,399,967	119,602,150	104,401,600	218,764,336	0.778924731	0.986121227	0.974885776
3	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	768,917,660	16,703,407.00	315,099,116.00	764,485,460	16,678,000	309,882,540.00	0.994235794	0.998478933	0.98344465
JUMLAH		952,465,523	140,276,475.00	560,398,873	900,348,650	135,004,060	549,439,616.00	0.945282142	0.962414118	0.980443828

Praya , 25 Nopember 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Lombok Tengah



H. NURJAHMAN, SP, MM
NIP. 19681231 199710 1 005

Kinerja anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu 2022 s/d 2024 berdasarkan rata-rata realisasi anggaran dinilai cukup baik, dilihat dari rata-rata pertumbuhannya, program Pengelolaan perikanan tangkap menjadi program satu-satunya dengan pertumbuhan anggaran tertinggi dibandingkan dengan beberapa Program strategi lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini sebanding dengan tingkat rata-rata pertumbuhan rasio capaian kinerjanya. Hal ini dilihat dari rata-rata pertumbuhan rasio capaian kinerja antara program pengelolaan perikanan tangkap lebih tinggi dibandingkan dengan 3 (Tiga) bidang lainnya (Red: program pengelolaan perikanan budidaya, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan) selain itu walau anggarannya tidak sama dengan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya cenderung jauh lebih rendah pagu program pengelolaan perikanan tangkap namun capaiannya lebih tinggi.

Sedangkan untuk program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menjadi satu-satunya program dengan pertumbuhan anggaran terendah dibandingkan Program strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Lainnya. yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah.

2.3. Penentuan Isu - isu Strategis

Pelaksanaan pembangunan perikanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021 - 2024 dapat memberikan manfaat maupun dampak positif yang bisa dirasakan namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan Hambatan dari telaahan visi dan misi Pemerintah Daerah dan analisis lingkungan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten LombokTengah, maka Beberapa

permasalahan dan hambatan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi dari Bidang Teknis dan UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Unit Eselon III	Masalah	Penyebab	
Perikanan Tangkap	1 Rendahnya Produktifitas Nelayan	1 Armada yang dimiliki oleh nelayan masih tradisional	
		2 Masih rendahnya kemampuan nelayan dalam mengoperasikan sarana modern	
		3 Terbatasnya Modal Usaha yang dimiliki oleh nelayan	
		4 Perubahan Iklim/Cuaca Ekstrem	
		5 Sarana dan Prasarana tempat pelelangan ikan belum memenuhi standar	
		6 Terbatasnya SDM Pengelola TPI baik secara kualitas maupun kuantitas	
Pengelolaan Perikanan Budidaya	1 Rendahnya produktifitas pembudidaya ikan	1 Ketersediaan benih ikan , Calon induk ikan dan Induk Ikan yang unggul masih terbatas	
		2 Sarana dan prasarana budidaya yang memenuhi persyaratan teknis belum memadai	
		3 Serangan hama dan penyakit ikan	
		4 Tingginya harga pakan ikan	
		5 Terbatasnya Modal Usaha yang dimiliki oleh Pembudidaya Ikan	
		6 Konflik penggunaan ruang	
		7 Perubahan Iklim/Cuaca	
		1 Sarana dan prasarana BBI dan dempond tambak belum memadai	
Belum optimalnya Pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) dan dempond tambak	2 Terbatasnya SDM pengelola BBI dan dempond tambak baik secara kualitas maupun secara kuantitas		
Pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	1 Terbatasnya kualitas dan kuantitas produk olahan hasil perikanan	Terbatasnya SDM dan penguasaan teknologi produk olahan hasil perikanan	
		2 TinTingkat konsumsi ikan masih rendah	Tata niaga pemasaran hasil perikanan belum terkelola dengan baik
		3 Kuantitas dan kualitas garam rakyat masih rendah	Sarana dan prasarana pengolahan garam rakyat masih rendah

Tantangan dan Peluang yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu:

➤ **Tantangan yang dihadapi antara lain:**

- ✚ Tingkat produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan masih rendah
- ✚ Kurangnya akses permodalan ke lembaga keuangan
- ✚ Penguasaan teknologi kelautan dan perikanan masih kurang memadai dan SDM masyarakat perikanan masih rendah
- ✚ Penguasaan Teknik Penanganan Pasca Panen Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Masih Rendah
- ✚ Sarana, Prasarana kelautan dan perikanan masih kurang memadai
- ✚ Diversifikasi Produk Perikanan
- ✚ Ketersediaan benih unggul dan bermutu terbatas
- ✚ Infrastruktur pendukung pembangunan Kelautan dan Perikanan belum memadai
- ✚ Terjadi Konflik penggunaan Ruang
- ✚ Alih Fungsi Lahan dari Tambak Garam Menjadi Tambak Udang
- ✚ Belum Tersertifikasinya Produk Garam Rakyat
- ✚ Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya makan ikan untuk meningkatkan nilai gizi keluarga yang masih rendah.

➤ **Peluang yang ada antara lain:**

- ✚ Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar
- ✚ Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Pembudidaya Ikan, Nelayan, Pengolah, pemasar dan petambak garam) cukup banyak
- ✚ Fasilitasi Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Keuangan
- ✚ Adanya program pemberdayaan masyarakat perikanan dan kelautan
- ✚ Teknologi dan inovasi perikanan dan kelautan yang semakin berkembang
- ✚ Dukungan Pemerintah pada sub sektor Kelautan dan Perikanan

semaikn besar

- ✚ Program dan Kegiatan untuk penguatan sarana dan prasarana perikanan
- ✚ Pelaksanaan Sosialisasi Gemar Makan Ikan
- ✚ Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan
- ✚ Dukungan Program Penyediaan Pakan Mandiri
- ✚ Dukungan Pelaksanaan Program Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan
- ✚ Koordinasi antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Propinsi/ Kementerian dan Lembaga
- ✚ Adanya Koordinasi Lintas Sektor
- ✚ Rencana Zonasi Tata Ruang dan Pola Ruang
- ✚ Pembukaan Lahan Baru untuk Tambak Garam
- ✚ Adanya dukungan dana untuk kegiatan sosialisasi GEMARIKAN, lomba masak ikan, bazaar produk hasil Perikanan dan sebagainya

Berdasarkan hasil Identifikasi Tantangan dan Peluang terhadap hasil pembangunan periode sebelumnya dan telaahan visi dan misi Pemerintah Daerah serta analisis lingkungan strategis maka disusun isu - isu strategis dalam pembangunan kelautan dan perikanan untuk ditindaklanjuti dalam perumusan dan program kegiatan prioritas, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Potensi Sumberdaya kelautan dan perikanan belum dikelola secara optimal;
- b. Sarana Prasarana Pendukung Produksi Kelautan dan Perikanan masih belum memadai;
- c. Penguasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan Masih Kurang
- d. Tingginya harga pakan dan terbatasnya ketersediaan benih unggul dan bermutu tinggi dalam pengembangan perikanan budidaya;
- e. Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga teknis perikanan dan penyuluh

perikanan

- f. Lemahnya akses permodalan bagi usaha menengah, kecil dan mikro sector Kelautan dan Perikanan
- g. Pendapatan Perkapita Masyarakat Kelautan dan Perikanan masih rendah
- h. Infrastruktur Pendukung pembangunan kelautan dan perikanan belum memadai
- i. Konflik penggunaan ruang antara pariwisata dan Kelautan dan Perikanan
- j. Tingkat konsumsi ikan masyarakat masih rendahnya

Keterbatasan yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah tidak menyurutkan kinerja keseluruhan SKPD untuk terus berupaya mencapai visi dan misi kepala daerah. Karena dalam menyusun program dan kegiatan selalu mengacu kepada ketentuan yang ada di atasnya baik itu dari Dinas Propinsi maupun dari kementrian teknis terkait.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan Langkah ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat, dan Pada Renja ini terdapat beberapa sub kegiatan yang disesuaikan pagu indikatif dan targetnya. Adapun review terhadap Renja RKPD ditunjukkan Tabel 2.3 di bawah ini sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan Kabupaten Lombok Tengah. Adapun review terhadap Renja RKPD ditunjukkan Berikut reuiu terhadap Renja RKPD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah pada Tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator /Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /SubKegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Target 2026	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Lombok Tengah	Produksi Perikanan Tangkap	3.524,66 ton	1.235.600.001	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Lombok Tengah	Produksi Perikanan Tangkap	3.438,69 ton	5.129.863.450	
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec.Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya dan Praya Tengah	Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan yang tersedia	29 unit	323.140.574,-	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec.Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya dan Praya Tengah	Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan yang tersedia	126 Unit	4.309.505.070,-	KEPMENDAGRI Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Lombok Tengah	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Dokumen	44.350.000,-	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Lombok Tengah	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Dokumen	46.377.352	
SubKegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kec. Praya Barat, Kec. Praya Barat Daya, Kec. Praya dan Kec. Praya Tengah	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	24 Unit	39.622.349,-	SubKegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kec. Praya Barat, Kec. Praya Barat Daya, Kec. Praya dan Kec. Praya Tengah	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	34 Unit	734.706.000	KEPMENDAG RI Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
SubKegiatan Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan Tangkap	Kec. Praya Barat, Kec. Praya Barat Daya, Kec. Praya dan Kec. Praya Tengah	Tersedianya sarana usaha perikanan tangkap	5 unit	239.168.225	SubKegiatan Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan Tangkap	Kec. Praya Barat, Kec. Praya Barat Daya, Kec. Praya dan Kec. Praya Tengah	Tersedianya sarana usaha perikanan tangkap	5 unit	239.168.225	

Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Praya, Praya Tengah, Pujut, Kec. Praya Barat, Kec. Praya Timur dan Kec. Praya Barat Daya	Peningkatan Kelas Kelompok KUB (Kelompok)	50 KUBE	844.269.334,-	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Praya, Praya Tengah, Pujut, Kec. Praya Barat, Kec. Praya Timur dan Kec. Praya Barat Daya	Peningkatan Kelas Kelompok KUB (Kelompok)	50 KUBE	975.240.213,00	KEPMENDAGRI Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
		Penumbuhan Kelompok Usaha Nelayan (KUB) Baru	20 KUBE				Penumbuhan Kelompok Usaha Nelayan (KUB) Baru	20 KUBE		
							Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan	35 unit		
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Lombok Tengah	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan kapasitasnya	450 orang	186.645.533,-	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kec. Pujut, Praya Timur dan Praya Barat	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan kapasitasnya	350 orang	134.573.742,00	Sub kegiatan bansarpras untuk Prog. Kemiskinan dan keluarnya Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan Penambahan asuransi nelayan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kec. Praya, Praya Tengah, Pujut, Kec. Praya Barat, dan Kec. Praya Barat	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	25 kelompok	27.846.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kec. Praya, Praya Tengah, Pujut, Kec. Praya Barat, Kec. Praya Timur	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	25 kelompok	22.288.933	Keterbatasan Anggaran sehingga disesuaikan dgn pagu indikatif renja tahun 2025

	Daya					dan Kec. Praya Barat Daya				
Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kec.Praya Barat dan Pujut	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan dan Kemitraan Usaha	20 unit Usaha	10.500.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kec.Praya	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan dan Kemitraan Usaha	20 unit Usaha	13.650.822	
-	-	-	-	-	SubKegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Keci	Kab. Loteng	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	35 unit	804.726.716	Dengan Keluarnya Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 sehingga muncul subkegiatan baru dan Sub kegiatan bansarpras untuk kegiatan DAK dan kemasyarakatan
Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kec.Pujut			36.690.093	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kec.Pujut	Jumlah Ikan yang dilelang (Ton)	30 Ton	12.069.137	Kegiatan lelang belum terlaksana secara optimal karena ada pihak ketiga yang mengelola rantai dingin (cold storage) pada pertengahan

										tahun tidak operasional lagi	
	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Awang Ds.Persiapan Kec.Pujutan	Jumlah Layanan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	36 Layanan	36.690.093,-	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Awang Ds.Persiapan Kec.Pujutan	Jumlah Layanan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	36 Layanan	12.069.137	
	Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Lombok Tengah	Jumlah Rekomendasi Kapal Perikanan uk.sampai dengan 10 GT yang terdaftar	260 rekomendasi	31.500.000	Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rekomendasi Kapal Perikanan uk.sampai dengan 10 GT yang terdaftar	260 rekomendasi	33.452.233	
	SubKegiatan Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Lombok Tengah	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	260 rekomendasi	31.500.000	SubKegiatan Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Lombok Tengah	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	260 rekomendasi	33.452.233	
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi Perikanan Budidaya	47053,94 ton	4.509.700.000,-	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kabupaten Lombok Tengah	Produksi Perikanan Budidaya	47053,94 ton	2.950.833.752,00	Menyesuaikan dengan pagu Indikatif anggaran Thn 2025
			Produksi Benih	9.003.777 ekor	2.917.539.600,-			Produksi Benih	9.003.777 ekor		
			Laju pertumbuhan								

		Produksi Perikanan Budidaya	2,0%							
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	104,72							
Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan Yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Loten g	Jumlah Rekomendasi Dokumen Pelayanan Perijinan perikanan budidaya	2 Dokumen	28,000,000	Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan Yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupat en Lombok Tengah	Jumlah Rekomendasi Dokumen Pelayanan Perijinan perikanan budidaya	2 Dokumen	6.671.000,-	Penyesuaian pagu indikatif tahun 2025 karena Keterbatasan anggaran
SubKegiatan Pelayanan Penerbitan Ijin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan ikan yang usahanya , lokasi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, intensif serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing	Kec.Praya	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	15,000,000	SubKegiatan Pelayanan Penerbitan Ijin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan ikan yang usahanya , lokasi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, intensif serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing	Kec.Praya	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	6.671.000	

Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil		Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan Menerapkan teknologi Budidaya perikanan (Kelompok)	5 kelompok	50.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil		Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan Menerapkan teknologi Budidaya perikanan (Kelompok)	33 kelompok	14.670.084,-	
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Kab.Loten g	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	15.000.000,-	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Kab.Lote ng	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	14.670.084,-	
SubKegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan pendanaan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab.Loten g	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	6 Kelompok	5,000,000	SubKegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan pendanaan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab.Lote ng	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	5 kelompok	0	Keterbatasan Anggaran, bekerja sama dengan Lembaga Keuangan (LPMUKP)/ KKP-RI
SubKegiatan Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Lombok Tengah	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	30 Kelompok	30,000,000	SubKegiatan Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Lombok Tengah	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0	00	Keterbatasan Anggaran

Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Tanda Daftar bagi pembudidaya ikan (Dokumen)	600 Dokumen	5.000.000,-	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Tanda Daftar bagi pembudidaya ikan (TDPIK) (Dokumen)	600 Dokumen	0	Keterbatasan Anggaran/Berkoordinasi dengan PPL Perikanan Pusat
Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 daerah kabupaten/kota	Kec.Praya	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Rekomendasi	5.000,000	Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 daerah kabupaten/kota	Kec.Praya	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Rekomendasi	0	Berkoordinasi dengan PPL Perikanan
Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan		Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan yang tersedia (unit)	37 unit	2.847.539.600	Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan		Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan yang tersedia (unit)	54 unit	2.929.492.668,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi pembudidaya ikan kecil dalam 1 daerah kabupaten/kota	Kec.Praya	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	25,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi pembudidaya ikan kecil dalam 1 daerah kabupaten/kota	Kec.Praya	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0	Keterbatasan anggaran berkoordinasi dengan PPL Perikanan & enumerator statistic Perikanan.
Sub Kegiatan Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota	Praya Timur dan BKU	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11 Unit	550.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota	Praya Timur, BKU, Pujut, Jonggat, Praya,	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14 unit	464.796.000,-	Sub kegiatan bansarpras untuk kegiatan DAK

	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jonggat, BKU, Batukliang, Kopang, Pringgarrata, Janapria, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur dan Pujut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27 unit	2,948,200,000	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jonggat, BKU, Batukliang, Kopang, Pringgarrata, Janapria, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur dan Pujut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40 unit	2.456.746.668,00	Sub kegiatan bansarpras untuk kegiatan DAK
	Sub Kegiatan Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Lombok Tengah	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	11 Dokumen	8.500.000,-	Sub Kegiatan Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Lombok Tengah	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	12 Dokumen	7.900.000	Penyesuaian Pagu anggaran
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan ikan di Darat	Lombok Tengah	Jumlah Pembudidayaan yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di Darat	10 orang	5.000.000,-	Sub Kegiatan Perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat	Lombok Tengah	Jumlah Pembudidayaan Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	0	0	Keterbatasan Anggaran
III	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Meningkatnya Produksi pengolahan hasil perikanan (Ton)	4.863,97 ton	1.132.820.000,-	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Meningkatnya Produksi pengolahan hasil perikanan (Ton)	4863.97 ton	379.999.740,00	Kterbatasan Pagu Anggaran Indikatif

		Produksi Garam Rakyat (Ton)	3613,53 ton							
		Laju pertumbuhan Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	2,0 %							
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil		Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	20.000.000	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil		Jumlah rekomendasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi penerbitannya (Dokumen)	12 dokumen	13.964.790,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	Lombok Tengah	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	12 Dokumen	20.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	Lombok Tengah	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	12 Dokumen	13.964.790,00	Penyesuaian anggaran karena keterbatasan anggaran daerah
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 daerah kabupaten / kota	Lombok Tengah	Volume produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton/bulan atau ton/tahun).	50.4992,63 ton	207.693.814	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 daerah kabupaten / kota	Kabupaten Lombok Tengah	Jumlah Ikan dan Garam yang tersalurkan sebagai bahan baku industry	49033 ton	366.034.950,00	Keterbatasan pagu anggaran

	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 daerah kabupaten/Kota	Lombok Tengah	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	1 kelompok pelaku usaha	99.693.814	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 daerah kabupaten/Kota	Lombok Tengah	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	70 pelaku usaha	233.818.000,00	
						Subkegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Loteng	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4800 ton	132.216.950,00	Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, muncul menjadi sub kegiatan baru pada Keg. Penyediaan dan Penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 daerah kabupaten / kota
IV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Praya	Nilai SAKIP OPD	B	5.682.182.121	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Praya	Nilai SAKIP OPD	B	5.682.182.121,00	Penyesuaian pagu anggaran indikatif
	Kegiatan Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Praya	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun (Dokumen)	7 dokumen	109.866.958	Kegiatan Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun (Dokumen)	11 dokumen	109.866.958,-	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Praya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	22.668.091	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Praya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	22.668.091	Penambahan pada item Belanja

Perangkat Daerah		Daerah			Perangkat Daerah					bimtek penyusunan dokumen perencanaan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Praya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.509.020	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Praya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.509.020	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Praya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.442.388	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Praya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.442.388	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Praya	Jumlah Dokumen DPA -SKPD	1 Dokumen	752.088	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Praya	Jumlah Dokumen DPA -SKPD	1 Dokumen	752.088	
Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Praya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	19.617.407	Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Praya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	19.617.407	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Praya	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	24.497.374	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Praya	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	24.497.374	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Praya	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	2 Berita Acara	29.380.590	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Praya	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	29.380.590	

		Perangkat Daerah								
					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Praya	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12 Dokumen	Rp. 5.000.000,-	Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 penambahan subkegiatan baru pada kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Praya	<i>Administrasi Keuangan yang tersusun</i>	12 Laporan	4,891,713,172	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Praya	<i>Administrasi Keuangan yang tersusun</i>	15 Laporan	4.621.634.373,-	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Praya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	602 org bln	4.598.788.166	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Praya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	602 org bln	4.598.788.166	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Praya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	3.289.697	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Praya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	3.289.697,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Praya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	14 Laporan	19.556.510	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Praya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	14 Laporan	19.556.510,-	Sesuaikan dgn pagu indikatif

		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					/Semesteran SKPD			
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Praya	<i>Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi (jenis)</i>	4 jenis keg	109.950.721	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Praya	<i>Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi (Jenis)</i>	7 jenis keg	109.950.721,00	
Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Praya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1jenis	6.020.955	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Praya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.020.955,-	
Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Praya	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 unit	3.976.577	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Praya	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Unit	3.976.577,00	
Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Praya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	47,197,260	Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Praya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	4.927.890,00	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Praya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 laporan	79.630.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Praya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 laporan	79.630.000,-	
SubKeg. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Praya	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis</i>	1 Dokumen	15.395.299,00	SubKeg. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Praya	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen	15.395.299,00	

		<i>Elektronik pada SKPD</i>								
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Praya	<i>Barang Milik Daerah Tercatat(Unit)</i>		404.732.130	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Praya	<i>Barang Milik Daerah Tercatat (Unit)</i>	7 unit	404.732.130,00,-	
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Praya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	1 Unit	361.141.200	Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Praya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia	3 Unit	23.590.930,00	
Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Praya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	20.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Praya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	20.000.000	
Sub Keg.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Praya	Jumlah peralatan dan mesinlainnya yang tersedia	9 unit	23.590.930	Sub Keg.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Praya	Jumlah peralatan dan mesinlainnya yang tersedia	9 unit	23.590.930	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Praya	<i>Laporan Layanan Pemerintah Daerah(Bln)</i>	12 Laporan	290.752.452	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Praya	<i>Laporan Layanan Pemerintah Daerah (Bln)</i>	12 Laporan	290.752.452,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi , sumberdaya air dan listrik	Praya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	159.808.452	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi , sumberdaya air dan listrik	Praya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	159.808.452	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Praya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor yang tersedia	12 laporan	130,944,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Praya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor yang tersedia	12 laporan	130.944.000,00	

Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Praya	BMD dalam Kondisi Baik (Unit)	69 unit	236.696.932	Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Praya	BMD dalam Kondisi Baik (Unit)	69 unit	145.245.487,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Praya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	55 unit	122.886.238	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Praya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	55 unit	122.886.238,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Praya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	13 unit	7.790.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Praya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	13 unit	7.790.000,-
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Praya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	9.079.249	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Praya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	9.079.249,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Praya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)	10 unit	5.490.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Praya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)	10 unit	5.490.000,00

Berdasarkan hasil analisa kebutuhan diatas yang mana terdapat beberapa catatan penting antara lain :

- Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Terdapat 4 Program yaitu 1 Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 3 Program Strategis dengan 6 kegiatan Penunjang serta 10 Kegiatan Teknis dengan 46 Sub Kegiatan
- Penyesuaian dan penambahan nama sub kegiatan baru yang akan dilaksanakan tahun 2026 (terutama dengan keluarnya pmutakhiran Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 pengganti KEPMENDAGRI Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diikuti dengan penyesuaian target
- Pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan KEPMENDAGRI Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 terjadi pengurangan capaian target kegiatan dan dikuti oleh penurunan anggaran indikatif hal ini disebabkan beberapa item pekerjaan berpindah ke Kegiatan Pemberdayaan nelayan kecil di subkegiatan SubKegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Keci termasuk program kemiskinan.
- Pada sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap terjadi penambahan target capaian kinerja hal ini berdasarkan keluarnya KEPMENDAGRI Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
- Pada Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota terjadi penanmbahan indikator kinerja nya dari 2 indikator menjadi 3 indikator kinerja nya

hal ini di sebabkan karena keluarnya KEPMENDAGRI Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil terjadi penurunan target kinerja dan anggaran hal ini terjadi karena keluarnya KEPMENDAGRI Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 sehingga untuk program kemiskinan dan asuransi nelayan di alihkan ke sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Keci (Kegiatan Baru).
- Pada Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan Yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terjadi pengurangan anggaran hal ini terjadi karena Penyesuaian pagu indikatif tahun 2025 karena Keterbatasan anggaran.
- Untuk SubKegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan pendanaan Pembiayaan, Kemitraan Usaha dan SubKegiatan Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terjadi penghapusan anggaran hal ini terjadi karena Keterbatasan Anggaran, untuk mengatasi hal tersebut pihak dinas bekerja sama dengan Lembaga Keuangan (LPMUKP)/ KKP-RI.
- Pada Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 daerah Kabupaten/Kota terjadi pengurangan anggaran dari Rp.5.000.000,- menjadi Rp.0,- hal ini karena penyesuaian pagu indikatif dan keterbatasan anggaran.
- Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya Ikan Kecil sebesar Rp25.000.000 dinolkan karena keterbatasan anggaran dan penyesuaian pagu indikatif , namun target tetap dilaksanakan melalui koordinasi dengan PPL dan enumerator.

➤

- Pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang semula berdasarkan KEPMENDAGRI nomor 050-3708 tahun 2020 untuk Kabupaten/Kota memiliki 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan sekarang berubah setelah keluarnya pemutakhiran Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 menjadi 2 Kegiatan dengan 3 Sub Kegiatan .
- Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdapat penambahan subkegiatan yaitu SubKegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah, yang tahun-tahun sebelumnya tidak pernah dianggarkan dan tahun 2026 dianggarkan hal ini bertujuan 1). Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan Program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan -RI serta Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTB ; 2) Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah; 3) Menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; 4) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah.
- Terdapat penambahan subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD di Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tahun sebelumnya tidak pernah dianggarkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik

2.5. Penelaahan Usul Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap program dan kegiatan yang terdapat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah melalui mekanisme musrenbang dan pengajuan proposal. Bisa saja kegiatan dilakukan tanpa

melalui musrenbang jika memang di daerah tersebut menurut pertimbangan Dinas Kelautan Perikanan Kab. Lombok Tengah membutuhkan kegiatan, sedangkan mekanisme musrenbang tetap harus dilakukan dengan melengkapi usulan dalam bentuk proposal dan kemudian akan dilakukan evaluasi terhadap calon penerima.

Pada tahun 2025 ini untuk usulan renja tahun 2026, Tidak ada yang masuk usulan baik itu dari desa maupun kecamatan karena usulan dibatasi dalam 1 desa hanya boleh mengusulkan 2 kegiatan prioritas saja, untuk musrenbang yang dilaksanakan di 12 kecamatan di kabupaten Lombok Tengah.

Forum Perangkat Daerah Tingkat Kecamatan Lombok Tengah dilaksanakan untuk membahas rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 yang dilaksanakan pada bulan maret 2026 selama seminggu, untuk di teruskan ke Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD di kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Adapun Usulan melalui aspirasi RKPD tahun 2025 untuk renja 2026 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini, dimana terdapat 39 (Tiga Puluh Sembilan) usulan aspirasi melalui Pokok pikiran DPRD Lombok Tengah. Yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan Yaitu Kecamatan Pujut, Praya Barat, Pringgarata, Praya Timur, Batukliang, Batukliang Utara , Janapria, Kopang, Praya Barat Daya, Jonggat dan Praya.

Tapi dari 39 usulan yg masuk melalui Aspirasi hanya 7 usulan yang berisifat final yaitu Perahu < 5 GT (12 Meter, API berupa Pancing) yg berlokasi di Dundun Desa Mertak Kecamatan Pujut, Perahu < 5 GT (9 Meter, API berupa Gill Net) berlokasi di Tanak Rarang, Kecamatan Praya Barat, Perahu < 5 GT (12 Meter, API berupa Gill Net) berlokasi di desa kidang kec praya timur, Pengadaan Peralatan Nelayan yang berlokasi di Kecamatan Pujut, Pengadaan Pakan Ikan yang berlokasi di kecamatan pringgarata, kecamatan batukliang , dusun aik bone desa aik bukak kec batukliang utara, serta Kecamatan Janapria dan Kopang, Kab. Lombok Tengah.

Usulan tersebut ditujukan pada 2 bidang yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah dari 3 bidang yang ada yaitu Bidang Perikanan

Tangkap melalui program pengelolaan perikanan tangkap dan bidang perikanan budidaya melalui program pengelolaan perikanan budidaya.

Berikut Review terhadap rekapan usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 di Kabupaten Lombok Tengah melalui urusan kelautan dan perikanan berdasarkan jenis kegiatannya sebagaimana tabel di bawah ini:

NO	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Kecil				
	Sub Kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota				
	✚ Pengadaan mesin pembuat pakan ikan	Ds. Pringgarata Kecamatan Pringgarata	Jumlah Mesin pellet yang tersedia	2 unit	1. Tingginya Harga Pakan 2. Merupakan Pengembangan Kawasan Kampung Budidaya 3. Sentra Unit perbenihan Rakyat (UPR)
	✚ Pembuatan Kolam Ikan bagi pokdakan	Kecamatan Batukliang	Jumlah kolam ikan yang terbangun	1 unit	1. Kawasan penyangga kampung budidaya 2. Prasarana kurang memadai
	✚ Pengadaan pakan ikan	Kec.pringgarata dan batukliang	Jumlah pakan ikan yang tersedia	10 ton	3. Tingginya harga pakan 4. Kawasan penyangga
	✚ Pengadaan pakan ikan	Kecamatan Batukliang dan Batukliang Utara	Jumlah pakan ikan	1 paket	5. Tingginya harga pakan 6. Kawasan sentra kampung budidaya
	✚ Pengadaan Pakan ikan	Dusun Aik Bone Ds.Aik	Jumlah pakan ikan	1 pak	7. Tingginya harga pakan

		Bukak Kecamatan Batukliang Utara	yg tersedia	et	8. Kawasan sentra Kampung budidaya
	✚ Pengadaan kolam ikan terpal	Ds. Mantang Kec.Batukliang dan Batukliang Utara	Jumlah kolam terpal yang tersedia	1 paket	9. Kawasan sentra kampung budidaya 10. Kawasan penyangga 11. Prasarana kurang memadai
	✚ Pengadaan pakan ikan	Kecamatan Janapria dan Kopang	Jumlah pakan yang tersedia	1 paket	12. Tingginya harga pakan 13. Kawasan penyangga
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				
	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil				
	Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil				
	✚ Perahu < 5 GT (12 Meter, API berupa Pancing)	DUNDUN DESA MERTAK KECAMATAN PUJUT, Kab. Lombok Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	1 paket	Program Kemiskinan (P3KE) Bantuan sarana penangkapan ikan
	✚ Perahu < 5 GT (9 Meter, API berupa Gill Net) :	Tanak Rarang, Kab. Lombok Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	1 unit	Program Kemiskinan (P3KE) Bantuan sarana penangkapan ikan
	✚ Perahu < 5 GT (12 Meter, API berupa Gill Net) :	desa kidang kec praya timur, Kab. Lombok Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	1 paket	Program Kemiskinan (P3KE) Bantuan sarana penangkapan ikan
	✚ Perahu < 5 GT (12 Meter, API berupa Gill Net) :	KOPTAN GERUPUK KECAMATAN PUJUT, Kab. Lombok	Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	1 paket	

		Tengah			
	✚ Perahu < 5 GT (12 Meter, API berupa Pancing)	dusun tebuak desa prabu kec pujut, Kab. Lombok Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	1 paket	
	✚ Pengadaan Peralatan Nelayan	Kecamatan Pujut, Kab. Lombok Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	1 Paket	

Adapun usulan aspirasi dewan setelah direkap berdasarkan jenis kegiatannya mengerucut menjadi 5 jenis kegiatan yaitu:

1. Pengadaan Pakan Ikan sebanyak 4 paket
2. Pengadaan mesin pembuat pakan ikan (mesin pellet) sebanyak 2 unit
3. Pengadaan Perahu < 5 GT (12 Meter, API berupa Pancing) sebanyak 6 unit
4. Pengadaan Perahu < 5 GT (9 Meter, API berupa Gill Net) sebanyak 1 unit
5. Pengadaan Pengadaan Peralatan Nelayan sebanyak 1 paket.

Dari usulan tersebut diatas semua di akomodir oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah karena 1). masuk dalam lokasi program prioritas 2). Program Kemiskinan dengan sasaran nelayan miskin ekstrim 3). Prioritas Daerah dan Nasional.

Sementara hasil penyelarasan program dan kegiatan perangkat daerah Kabupaten/kota dengan usulan program/kegiatan hasil aspirasi terdapat pada 2 (dua) program yaitu 1). Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan merupakan program prioritas Daerah.

Namun pada Bulan Oktober tahun 2025, karena adanya pengurangan Dana Transfer dari pusat sebesar Tiga ratus delapan puluh tiga miliar lebih berdampak pula pada anggaran / pagu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Yang semula pagu indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp.9.256.543.492 berkurang menjadi Rp. 6.255.400.349,- .Sehingga banyak dari usulan tersebut di pending. Jadi Usulan final dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

TABEL FINALISASI ASPIRASI KABUPATEN LOMBOK TENGAH PD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	ANGGARAN penyesuaian KUPA PPAS	TAMBAHAN NOTA KEUANGAN	PAGU AKHIR	KETERANGAN
1	Perahu < 5 GT (12 Meter, API berupa Pancing)	DUNDUN DESA MERTAK KECAMATAN PUJUT, Kab. Lombok Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	100,000,000		100,000,000	-
2	Perahu < 5 GT (9 Meter, API berupa Gill Net) :	Tanak Rarang, Kab. Lombok Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	50,000,000		50,000,000	-
3	Perahu < 5 GT (12 Meter, API berupa Gill Net) :	desa kidang kec praya timur, Kab. Lombok Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	100,000,000		100,000,000	-
4	Perahu < 5 GT (12 Meter, API berupa Pancing)	Kecamatan pujut, Kab. Lombok Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan			-	lokasi berubah menjadi : dusun tebuak desa prabu kec pujut
5	Pengadaan Peralatan Nelayan	Kecamatan Pujut, Kab. Lombok Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	50,000,000		50,000,000	-
6	Pengadaan Pakan Ikan	kecamatan peringarata, kecamatan batu keliang , Kab. Lombok Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	50,000,000		50,000,000	-
7	Pengadaan Pakan Ikan	dusun aik bone desa aik bukak kec batukliang utara, Kab. Lombok Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	200,000,000		200,000,000	-
8	Pengadaan Pakan Ikan	Kecamatan Janapria dan Kopang, Kab. Lombok Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	300,000,000	100,000,000	400,000,000	pagu menjadi 400 jt

ANALISIS PENGENDALIAN

Pagu anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah pada awal tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp. 9.256.543.492,-, namun mengalami penurunan signifikan menjadi Rp6.255.400.349,- setelah dilakukan penyesuaian dan efisiensi anggaran. Penurunan anggaran tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan Dinas dalam mengakomodir seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Beberapa kegiatan prioritas, khususnya yang bersifat kemasyarakatan dan merupakan aspirasi dari pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan pagu yang tersedia. Kebijakan efisiensi ini mengharuskan Dinas melakukan penyesuaian arah pelaksanaan kegiatan dengan lebih memfokuskan pada **penguatan** kelembagaan masyarakat pelaku utama sektor kelautan dan perikanan melalui kegiatan peningkatan kapasitas, pelatihan, serta pendampingan teknis

Sementara itu, kegiatan yang bersifat pengadaan sarana dan prasarana (**sarpras**), termasuk pembangunan atau rehabilitasi fasilitas fisik, tidak dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut diperkirakan akan berdampak terhadap **pencapaian target kinerja** pada beberapa indikator hasil dan keluaran, terutama yang terkait langsung dengan dukungan sarana prasarana produksi perikanan. Namun demikian, Dinas tetap berupaya menjaga efektivitas pelaksanaan kegiatan yang tersisa agar capaian kinerja tetap optimal dengan memaksimalkan sumber daya dan dukungan yang ada. Dampak dari perubahan pagu anggaran ini diantisipasi akan mempengaruhi pencapaian target kinerja pada Renja Tahun 2026. Oleh karena itu, Dinas perlu mengoptimalkan sumber daya yang ada serta melakukan prioritas kegiatan untuk menjaga efektivitas capaian kinerja

Berikut dapat kami tampilkan tabel analisis pengendalian Pada Dinas Kelautan dan Perikanan pada Renja Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel Analisis Hasil Pengendalian
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah – Renja Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Permasalahan dan Kendala	Upaya Pemecahan / Rekomendasi
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	80% capaian indikator kinerja	65% capaian indikator kinerja	Penurunan anggaran menyebabkan pembatasan kegiatan pemberdayaan nelayan dan dukungan sarpras.	Fokus pada peningkatan kapasitas nelayan dan penguatan kelembagaan perikanan tangkap.
2	Program Pengelola Perikanan Budidaya	85% capaian indikator kinerja	70% capaian indikator kinerja	Pengurangan anggaran menghambat bantuan benih dan sarpras budidaya.	Optimalisasi kegiatan nonfisik seperti pelatihan dan pendampingan pembudidaya.
3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	75% capaian indikator kinerja	60% capaian indikator kinerja	Kegiatan pikir dan pengadaan sarpras pengolahan tidak dapat dilaksanakan.	Fokus peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan dukungan nonfisik.
4	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	90% capaian indikator kinerja	85% capaian indikator kinerja	Penyesuaian anggaran terbatas, kegiatan administratif masih dapat berjalan optimal.	Menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas rutin.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1. Telaahan Kebijakan Nasional

3.1.1.2. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP-RI) adalah "***Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.***"

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi KKP-RI periode 2025-2029 adalah sebagai Berikut :

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia melalui peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Kelautan dan Perikanan serta pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan.”;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional.
- 3) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
- 4) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Untuk Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan mencakup beberapa aspek utama yang mendukung keberlanjutan, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi sektor ini. Beberapa tujuan utamanya meliputi:

1. Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berkelanjutan Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan prinsip keberlanjutan agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.
2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Meningkatkan taraf hidup nelayan, pembudidaya ikan, serta masyarakat pesisir melalui penguatan ekonomi dan perlindungan sosial.
3. ***Penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi Menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu sumber ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produksi, distribusi, dan konsumsi ikan.***
4. ***Pengembangan Ekonomi Biru Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan yang ramah lingkungan, termasuk pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, dan energi kelautan.***
5. Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Memperkuat sektor perikanan dari hulu ke hilir dengan inovasi teknologi, peningkatan kualitas, serta akses pasar domestik dan internasional.
6. Pengelolaan Ruang Laut yang Terencana Mengembangkan tata kelola ruang laut yang berbasis pada keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan ekonomi.
7. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Menjaga sumber daya kelautan dan perikanan dari ancaman ilegal, seperti penangkapan ikan ilegal (IUU Fishing), pencemaran laut, serta praktik eksploitasi yang merusak lingkungan.

Sedangkan Sasaran Strategis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP - RI) Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan.
2. ***Pengembangan Ekonomi Biru Pengembangan ekonomi berbasis kelautan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan***

3. Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Peningkatan daya saing produk perikanan melalui sertifikasi global dan akses pasar internasional.
4. Pengelolaan Kawasan Konservasi Pengelolaan kawasan konservasi dengan target seluruh kawasan konservasi Indonesia masuk ke dalam kategori pengelolaan efektif pada tahun 2025-2029.

Arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan Republik Indonesia didasarkan pada prinsip **ekonomi biru**, keberlanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Berikut adalah arah kebijakan utama sektor kelautan dan perikanan Indonesia:

1) Pengelolaan Perikanan Tangkap Secara Terukur

- Menerapkan sistem kuota dan zona perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
- Mencegah overfishing dengan membatasi jumlah tangkapan.
- Mengutamakan kesejahteraan nelayan kecil dan lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

2) Pengembangan Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan

- Fokus pada komoditas unggulan, seperti udang, lobster, kepiting, dan rumput laut.
- Menerapkan sistem budidaya ramah lingkungan untuk mengurangi dampak ekologi.
- Meningkatkan efisiensi dan produktivitas tambak melalui teknologi modern.

3) Hilirisasi dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

- Peningkatan industri pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah.
- Peningkatan standar kualitas dan sertifikasi produk untuk pasar global.
- Pengembangan pasar ekspor ke negara-negara potensial.

4) Pengelolaan Ruang Laut dan Pulau-Pulau Kecil Secara Berkelanjutan

- Peningkatan kawasan konservasi laut untuk menjaga ekosistem pesisir.

- Restorasi mangrove, terumbu karang, dan padang lamun untuk mitigasi perubahan iklim.
 - Pemanfaatan ruang laut berbasis ekosistem untuk menghindari eksploitasi berlebihan.
- 5) Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing
- Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kapal asing ilegal.
 - Penerapan Vessel Monitoring System (VMS) untuk memantau kapal perikanan.
 - Kerja sama internasional dalam menangani pencurian ikan di perairan Indonesia.
- 6) Penguatan Infrastruktur dan Teknologi Sektor Kelautan dan Perikanan
- Pembangunan pelabuhan perikanan modern yang mendukung industri perikanan.
 - Digitalisasi sektor perikanan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi.
 - Penerapan teknologi Internet of Things (IoT) dalam perikanan budidaya dan tangkap
- 7) Peningkatan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya, dan Masyarakat Pesisir
- Pemberian akses permodalan dan bantuan sarana produksi bagi nelayan kecil.
 - Penguatan asuransi nelayan untuk melindungi mereka dari risiko kerja.
 - Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan keterampilan mereka.
- 8) Pengembangan Sektor Wisata Bahari dan Industri Maritim Berkelanjutan
- Penguatan wisata bahari berbasis konservasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.
 - Pengembangan energi terbarukan kelautan, seperti arus laut dan angin.

- Peningkatan investasi di sektor maritim untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi biru.

Dari uraian misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP-RI) tahun 2025-2029 di atas terdapat point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah yaitu pada point meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, Mengoptimalkan industrialisasi perikanan budidaya dan penangkapan ikan, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi Masyarakat.

3.1.1.2. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTB

Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025- 2029 yaitu ***“Nusa Tenggara Bangkit Bersama menuju propinsi kepulauan yang makmur mendunia”***. Visi ini menegaskan tekad untuk membangun NTB sebagai provinsi kepulauan yang maju, makmur, serta memiliki daya saing di tingkat nasional dan internasional, dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam berbasis darat dan laut secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu misi strategis yang menjadi landasan pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah

- 1) Misi 3, yaitu: **“NTB Agro Maritim: Membangun Ekosistem Industri Komoditas Unggulan Sektor Pertanian, Peternakan dan Kelautan Perikanan Menuju Terwujudnya Industri Agro Maritim yang Berkelanjutan.”** Misi ini bertujuan untuk membangun ekosistem produksi berbasis sektor agro maritim secara menyeluruh, dengan pendekatan industri dan keberlanjutan sumber daya. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari misi tersebut, ditetapkan tujuan pembangunan daerah, yaitu **“Terwujudnya Ekosistem Industri Agro Maritim yang Berkelanjutan.** Tujuan ini difokuskan untuk menciptakan ekosistem pertanian,

peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan yang produktif, berbasis nilai tambah, serta adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika global.

Sebagai bagian dari kerangka pengukuran tujuan tersebut, sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan adalah “Meningkatnya Kinerja Sektor Agro Maritim (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan serta Perikanan dan Kelautan),” yang diukur melalui indikator Persentase Peningkatan PDRB sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa sektor-sektor primer tersebut mampu berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB menetapkan tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan lima tahun ke depan, yaitu “Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan dan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan.”

Penetapan tujuan ini juga merujuk kepada arah kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yang mengarahkan fokus pembangunan sektor kelautan dan perikanan kepada peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan.

Pencapaian tujuan ini diukur melalui dua indikator utama, yakni :

- a. Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan (%) dan
- b. Nilai Tukar Perikanan (poin)

Melalui formulasi ini, sektor kelautan dan perikanan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat transformasi ekonomi berbasis agro maritim di NTB, memperluas basis kesejahteraan masyarakat pesisir, dan memperkuat daya saing daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global.

- 2) Misi 7, yaitu "Mempercepat Transformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan yang Kolaboratif dari Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagai Pondasi".

Sebagai penjabaran misi tersebut, ditetapkan Tujuan 13 untuk tujuan pembangunan daerah, yaitu "Terwujudnya Transformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif.

Tujuan ini bertujuan untuk mendorong reformasi birokrasi secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah, termasuk di sektor kelautan dan perikanan, dengan fokus pada penguatan transparansi, akuntabilitas, efektivitas pelayanan publik, serta inovasi dalam tata kelola.

Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, sasaran pembangunan daerah yang relevan adalah Sasaran 26, yaitu "Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja, Transparansi Pengelolaan Keuangan, dan Kualitas Perencanaan Daerah".

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), yang mencerminkan tingkat kematangan pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap perangkat daerah; dan
- b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan, yang menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Sasaran-sasaran dalam pembangunan kelautan dan perikanan periode tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- 1) Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya produktivitas sub sektor perikanan dan kesejahteraan masyarakat perikanan .

Capaian sasaran ini diukur melalui dua indikator utama:

- a. Produksi Perikanan (Ton), yang mencerminkan produktivitas ekonomi dari perikanan tangkap dan budidaya;
- b. Nilai Tukar Perikanan (poin), yang menggambarkan tingkat kesejahteraan

pelaku usaha perikanan melalui perbandingan antara harga yang diterima dan harga yang dibayarkan.

Kedua indikator ini menjadi refleksi langsung atas peningkatan produktivitas, efisiensi usaha, dan daya saing sektor kelautan dan perikanan Provinsi NTB.

2) Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas dari sasaran ini diukur melalui indikator : Implementasi Nilai SAKIP (poin), yang menilai tingkat efektivitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, termasuk aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan tindak lanjut kinerja. Melalui peningkatan implementasi nilai SAKIP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program pembangunan secara terencana, terukur, dan berorientasi pada hasil yang nyata dan berkelanjutan.

Kaitan /keselarasan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

Visi : “Nusa Tenggara Bangkit Bersama Menuju Propinsi Kepulauan Yang Makmur Mendunia”			
Misi III : NTB AGRO MARITIM : Membangun Ekosistem Industri Komoditas Unggulan Sektor Pertanian, Peternakan dan Kelautan Perikanan menuju terwujudnya Industri Agro Maritim yang Berkelanjutan.			
Misi VII : Mempercepat Transformasi Birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan inovatif serta kepemimpinan yang kolaboratif dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota sebagai pondasi			
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan dan kesejahteraan masyarakat perikanan	Meningkatnya produktivitas sub sektor perikanan dan kesejahteraan masyarakat perikanan	1. Pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap, Fasilitasi Sarana dan prasarana produksi, memperkuat kapasitas kelembagaan nelayan dan optimalisasi fungsi dan pelayanan pelabuhan	1. Implementasi Pergub No. 24 Tahun 2020 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Perizinan Kapal Perikanan

		perikanan	
			2. Pengembangan dan pengadaan unit penangkapan ikan, dan sarana pemulihan sumberdaya ikan
			3. Penguatan perlindungan nelayan dan peningkatan kapasitas usaha, pengetahuan serta kelembagaan tangkap
			4. Pengembangan sarpras dan pelayanan pelabuhan perikanan
			5. Penguatan regulasi pengelolaan perikanan berkelanjutan
			6. Kemitraan yang solid dalam pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan
			7. Mengembangkan teknologi dan informasi bagi kemudahan pelayanan publik bidang perikanan tangkap
			8. Penguatan pendataan produksi perikanan
		2. Pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya, Fasilitasi Sarana dan prasarana produksi, memperkuat kapasitas kelembagaan nelayan dan optimalisasi fungsi UPTD budidaya	1. Penguatan fungsi dan kapasitas pelayanan UPTD penghasil benih ikan
			2. Mengoptimalkan dan memperkuat kelembagaan dan fasilitasi pengembangan usaha budidaya,
			3. Pengembangan teknologi budidaya dan sarpras budidaya,
			4. Penyediaan induk dan benih unggul bagi pembudidaya dan masyarakat
			5. Penguatan infrastruktur perikanan budidaya
			6. Fasilitasi perizinan usaha, CBIB, CPIB dan

			SehatKan
			7. Fasilitasi kemitraan pelaku usaha dengan privat sektor
			8. Penguatan pendataan produksi perikanan budidaya
		3. Peningkatan Angka Konsumsi Ikan, Penguatan dan Pengembangan industri kelautan dan perikanan melalui peningkatan kualitas mutu, nilai tambah, daya saing, dan keamanan produk hasil perikanan serta fasilitasi akses pemasaran	1. Peningkatan kuantitas, kualitas, diversifikasi, kapasitas, dan produktivitas industri olahan,
			2. Fasilitasi perizinan, akses permodalan dan pasar, promosi produk, peningkatan standarisasi, jaminan mutu dan keamanan produk,
			3. Pemetaan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan 80 Provinsi NTB Tahun 2025-2029 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan pemasaran pemantauan logistik,
			4. Pembinaan poklhasr
			5. Penguatan dan pembinaan UPI
			6. Penguatan pengawasan dan pemantauan serta pengujian mutu produk hasil perikanan
			7. Pelaksanaan kampanye Gemarikan melalui Pemberian makanan tambahan berbahan baku ikan bagi anak sekolah, balita dan ibu hamil dan menyusui terutama di wilayah stunting
			8. Peningkatan koordinasi dengan UPT KKP, PKK dan mitra kerja pembangunan lainnya dalam pengembangan industri pengolahan hasil perikanan
	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya	1. Optimalisasi pengelolaan wilayah laut, pesisir dan Pulau	1. Mendorong perikanan dan kelautan berbasis blue economy

	kelautan dan perikanan secara berkelanjutan	pulau kecil	
			2. Penguatan dan fasilitasi sistem perizinan dan pemanfaatan ruang laut;
			3. Mendorong peningkatan pengelolaan Kawasan Konservasi
			4. Mitigasi, rehabilitasi ekosistem pesisir
			5. Pemberdayaan masyarakat pesisir
			6. Menjalin kemitraan dengan stakeholder dan NGO dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat pesisir
			7. Pengelolaan usaha garam dari hulu ke hilir
			8. Penguatan Fungsi dan kapasitas kelembagaan UPTD BPSDKP Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan 81 Provinsi NTB Tahun 2025-2029 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
			9. Mendorong penerapan pembangunan rendah karbon dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
			10. Penguatan database pendataan potensi dan pemanfaatan ruang laut dan wilayah pesisir dan PPK
			11. Adaptasi pengembangan teknologi informasi terhadap penyediaan data dan informasi serta pelayanan publik
		2. Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	1. Peningkatan sistem pemantauan dan pengawasan SDKP melalui pembangunan pos jaga, pengadaan speed boat, drone, dan implementasi sistem smart patrol
			2. Penguatan kapasitas dan kompetensi pengawas perikanan dan polsus
			3. Penguatan kinerja satgas pengawasan SDKP
			4. Pembinaan dan peningkatan partisipasi Pokmaswas melalui bimtek, operasi terpadu dan fasilitasi sarana dan operasional pengawasan

			5. Penguatan database pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan
			6. Penyediaan peta kerawanan destructive fishing sebagai target operasi pengawasan
			7. Adaptasi sistem teknologi dan informasi dalam bidang pengawasan SDKP
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan	1. Optimalisasi kebijakan aspirasi untuk penyediaan sarana usaha bagi masyarakat	1. Perlindungan dan pemberdayaan kelompok nelayan melalui mengembangkan mata pencaharian alternatif, Pemberdayaan KWN, sertifikasi Kecakapan Nelayan, Bimtek, Sehat Nelayan dan BPAN
		2. Meningkatkan koordinasi dan peran mitra pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat	2. Bantuan sarana usaha bagi masyarakat
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Transparansi Keuangan, dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan,	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas	Penguatan tata kelola kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan yang akuntabel, transparan, partisipatif, dan berbasis data melalui inovasi pelayanan publik dan pengelolaan kinerja yang terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas Kinerja dan Perencanaan Kinerja Berbasis Hasil
			<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Peningkatan Kualitas Perencanaan Anggaran
			<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi Digitalisasi Layanan dan Pengelolaan Data Sektor Kelautan dan Perikanan
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan perencanaan, penganggaran, monitoring, dan inovasi sektor KP.
			<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong budaya kerja kolaboratif dan profesional di lingkungan dinas.
			<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Internal dan Eksternal

			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas SDM dan Reformasi Birokrasi
--	--	--	---

Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi NTB mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui alokasi dana APBD I dengan sasaran utama sebagai berikut:

1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya

- Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap, seperti kapal nelayan dan alat tangkap ramah lingkungan.
- Pengembangan teknologi budidaya modern, seperti bioflok, RAS (Recirculating Aquaculture System), dan budidaya perikanan berkelanjutan.
- Pemberian bantuan benih dan pakan ikan untuk pembudidaya kecil guna meningkatkan produktivitas perikanan budidaya.

2. Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Garam

- Pembangunan dan rehabilitasi tambak garam rakyat dengan teknologi geomembran untuk meningkatkan kualitas produksi.
- Peningkatan kapasitas petani garam melalui pelatihan dan pendampingan teknis.
- Penguatan sistem pemasaran dan distribusi garam yang memenuhi standar mutu nasional.

3. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara Berkelanjutan

- Pembangunan dan pengelolaan kawasan konservasi laut dan pesisir untuk menjaga ekosistem laut.
- Rehabilitasi ekosistem pesisir melalui penanaman mangrove dan restorasi terumbu karang.
- Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan usaha berbasis sumber daya laut (seperti ekowisata bahari dan usaha berbasis bioteknologi kelautan).

4. Peningkatan Pengawasan dan Kepatuhan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- Penguatan sistem pengawasan laut berbasis teknologi, termasuk pemasangan

Vessel Monitoring System (VMS) untuk kapal perikanan.

- Pelaksanaan patroli laut secara berkala untuk mencegah illegal fishing dan eksploitasi sumber daya laut yang tidak ramah lingkungan.
- Peningkatan kesadaran dan edukasi hukum bagi pelaku usaha perikanan agar mematuhi regulasi yang berlaku.

5. Penguatan Infrastruktur Perikanan dan Sarana Pendukung

- Pembangunan dan peningkatan pelabuhan perikanan serta cold storage untuk menjaga mutu hasil tangkapan.
- Pengadaan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan, seperti pasar ikan modern dan fasilitas rantai dingin (cold chain).
- Pembangunan infrastruktur pengolahan limbah perikanan untuk mendukung industri perikanan berkelanjutan.

6. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

- Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, seperti fillet ikan, surimi, dan produk berbasis rumput laut.
- Pemberian bantuan peralatan pengolahan dan kemasan untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di sektor perikanan.
- Promosi dan ekspansi pasar untuk produk perikanan NTB melalui pameran dagang, digital marketing, dan kerja sama dengan industri ekspor.

Melalui Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah dalam proses penyusunannya telah mempertimbangkan penyelarasan dan harmonisasi substansi urusan dan sub urusan dengan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi, dimana kabupaten/kota menjadi wilayah sasaran pelaksanaan kegiatan sehingga dalam implementasi program dan kegiatan antara Kabupaten Lombok Tengah dan Propinsi NTB serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP-RI) dapat berjalan secara sinergi. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki hubungan relevansi yang sangat kuat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah. Hubungan dimaksud adalah merupakan bagian pertimbangan dalam memenuhi permohonan

pemanfaatan ruang bagi kegiatan investasi di Kabupaten Lombok Tengah. yang selanjutnya diselaraskan dengan Perda RTRW Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011. Dalam pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari KRP (Kebijakan Rencana dan Program) KLHS RPJMD, maka aspek kajian lingkungan strategisnya sangat diperlukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat berjalan secara optimal tanpa menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang signifikan. Namun dalam pelaksanaan pemanfaatan kawasan lingkungan perairan laut selama ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah selalu mendorong kajian terkait dengan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungannya

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan hal tersebut maka Visi Kabupaten Lombok Tengah adalah “ **Mewujudkan masyarakat Loteng yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Harmonis** “ dan untuk urusan Kelautan dan Perikanan pada RPJMD masuk pada Misi ke 3 yaitu “ **Mewujudkan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan** “ . Dengan sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan Produktivitas Pertanian dan indikator dari sasaran RPJMD tersebut yaitu Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian(%).

Sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Berdasarkan analisis permasalahan dan isu

strategis pembangunan sector kelautan dan perikanan yang cukup kompleks dan dinamis maka diperlukan langkah – langkah efektif melalui formulasi penyusunan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu :

Tujuan Renstra : Peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan kesejahteraan Pelaku Usaha KP, yang dilaksanakan melalui 2 (Dua) sasaran yaitu :

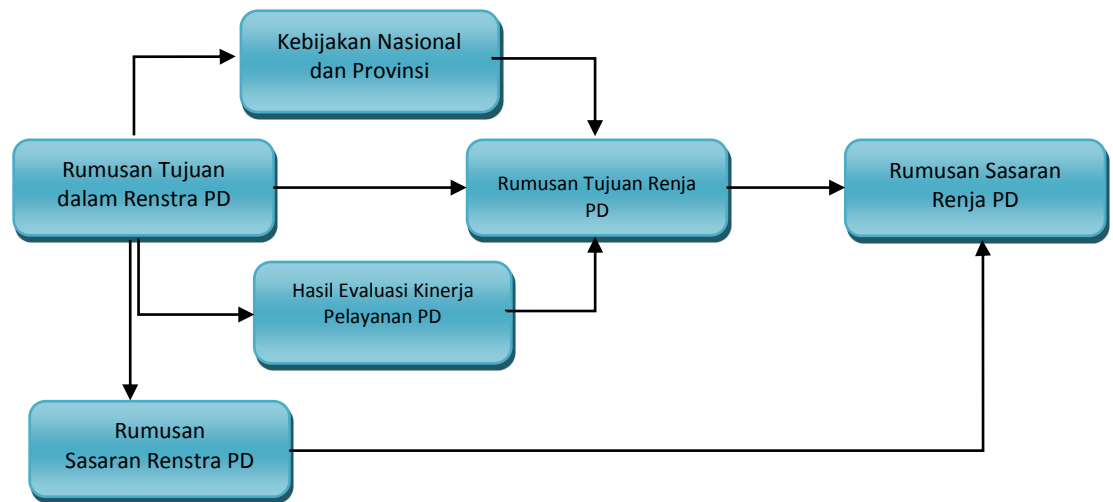
- ✚ Sasaran 1). Meningkatkan Produksi Perikanan yang berkelanjutan, dengan indikator Prosentase laju pertumbuhan produksi perikanan (%)
- ✚ Sasaran 2). Meningkatkan Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kapita/tahun) , dengan indikator Angka Knosumsi ikan (Kg/Kapita/tahun) (Kg/Kapita/Tahun)

Tujuan dan sasaran beserta indikatornya sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Kabupaten Lombok Tengah Renstra 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian Tahun 2024	Target Capaian tahun 2025	Target Capaian Tahun 2026
1	Peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan kesejahteraan Pelaku Usaha KP		Persentase kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB daerah (%)	3,55	2,36	2,39
			Nilai tukar nelayan (NTN)	107,95	103,99	104,73
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (%)	106,05	101,87	102,03
		Meningkatnya Produksi Perikanan yang berkelanjutan	Prosentase laju pertumbuhan produksi perikanan (%)	-37,11	1,11	1,11
		Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kapita/tahun)	Angka Knosumsi ikan (Kg/Kapita/tahun)	40,10	41,00	41,71

Diagram Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Diagram Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja PD

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan merupakan satu kesatuan dari rangkaian kerangka kerja mulai dari pendekatan *top down* (visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati) dan pendekatan *bottom up* (isu strategis).

Keterkaitan antara Visi dan misi ke – Tiga Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah terpilih dengan Tujuan, Sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada table 3.2 sebagai berikut:

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 – 2029

VISI : “Mewujudkan masyarakat Loteng yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Harmonis” (MASMIRAH)							
Misi 3 . “Mewujudkan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan “							
Sasaran Pemda : “Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Perikanan“							
no	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1.	Peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan kesejahteraan Pelaku Usaha KP	1.	Meningkatnya Produksi Perikanan yang berkelanjutan	1.1	Pengelolaan sumberdaya Perikanan Tangkap, Fasilitasi sarana dan prasarana produksi, memperkuat kapasitas kelembagaan nelayan dan optimalisasi Fungsi tempat pelelangan ikan (TPI	1	Penertiban Surat Tanda Daftar Kapal Perikanan < 5 GT
						2	Pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan
						3	Perlindungan dan pemberdayaan kelompok nelayan melalui Program asuransi Nelayandan pendampingan akses permodalan bagi nelayan
						4	Pembinaan dan pengembangan Usaha nelayan/keelompok dan penguatan sistim Informasi nelayan kecil.

VISI : “Mewujudkan masyarakat Loteng yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Harmonis” (MASMIRAH)

Misi 3 . “Mewujudkan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan “

Sasaran Pemda : “Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Perikanan“

no	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				5 Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan
			1.2 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan budidaya, Fasilitasi sarana dan prasarana Produksi, memperkuat kapasitas kelembagaan budidaya dan optimalisasi fungsi UPTD Budidaya	1 Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan budidaya laut, air payau dan air tawar
				3 Penguatan Kapasitas kelembagaan usaha budidaya dan fasilitasi kemitraan pelaku usaha budidaya
				4 Meningkatkan peran UPTD perikanan budidaya (BBI dan dempond tambak) sebagai pusat Produksi, distribusi dan pengembangan teknologi perikanan budidaya.
				5 Fasilitasi CBIB, CPIB dan SehatKan
				6 Penguatan Pendataan Produksi Perikanan budidaya
			1.3 Penguatan sistim pengawasan dan	1 Peningkatan pengawasan melalui

VISI : “Mewujudkan masyarakat Loteng yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Harmonis” (MASMIRAH)

Misi 3 . “Mewujudkan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan “

Sasaran Pemda : “Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Perikanan“

no	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	monitoring, dan evaluasi SDKP
				2 Peningkatan Kapasitas SDKP
				3 Penguatan data base pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan
		2 Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat (Kg/kapita/tahun)	2.1 Penguatan angka konsumsi ikan, penguatan dan pengembangan produk perikanan melalui peningkatan kualitas mutu, nilai tambah, daya saing dan keamanan produk hasil perikanan serta fasilitasi akses pemasaran	1 Penguatan Kapasitas dan produktifitas Poklhasar dan KUGAR
				2 Fasilitasi perijinan , akses pasar, promosi produk, peningkatan standarisasi dan keamanan produk
				3 Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan
				4 Penguatan dan pembinaan UPI
				5 Pemantauan dan pengujian mutu produksi hasil perikanan

VISI : “Mewujudkan masyarakat Loteng yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Harmonis” (MASMIRAH)

Misi 3 . “Mewujudkan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan “

Sasaran Pemda : “Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Perikanan“

no	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				6 Pelaksanaan kampanye GEMARIKAN
				7 Penguatan pendataan produk perikanan olahan hasil perikanan dan garam

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung capaian misi ke-Tiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 – 2029, dan Tujuan serta sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana rumusan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan akan diimplementasikan dalam program urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026, program, kegiatan dan subkegiatan dirancang berdasarkan Permendagri No. 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi Validasi . untuk periode Renstra Dinas Tahun 2025 - 2029.

Program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan KEPMENDAGRI dan Inmendagri no.2 tahun 2025 tersebut diatas menjelaskan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Terdiri dari bidang urusan, program, sub kegiatan, nomenklatur urusan, kinerja, indikator, dan satuan. Atas kewenangan kabupaten/kota . Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 5 program 16 kegiatan dan 42 sub kegiatan, yaitu dalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
1	Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	*	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	*	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
	*	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD
	*	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD
	*	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	*	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	*	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
	*	Subkegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	*	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	*	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	*	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semester SKPD
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	*	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
	*	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	*	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
	*	Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	*	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
		Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	*	Sub Kegiatan Pengadaan Mebelair
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

	*	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik.
	*	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	*	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
	*	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
*		Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
*		Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya
*		Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
B		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	*	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
	*	Subkegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
	*	Subkegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
	*	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
	*	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
	*	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Kecil.
		Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
	*	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
		Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	*	Sub Kegiatan Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)
D		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
2		Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
	*	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil
4		Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan
	*	Sub Kegiatan Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota
	*	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan ikan dalam

		1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
E	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	1	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil
	*	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 daerah Kabupaten/Kota
	2	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 daerah kabupaten / kota
	*	Sub Kegiatan Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 daerah kabupaten/kota
	*	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 daerah kabupaten/Kota
D	Program PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
	*	Subkegiatan Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
	*	Subkegiatan Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota
	*	Subkegiatan Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
	*	Subkegiatan Pengawasan Ekstraksi Garam

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih subkegiatan yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah pada Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025-2029 setelah dilakukan perubahan. Rencana program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 berisi program dan kegiatan untuk mencapai secara langsung sasaran yang ada guna mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan yang telah disertai pendanaan selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan KUA PPAS Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun program-program yang telah ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dijabarkan dalam rencana kerja tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 dalam bentuk kegiatan dan subkegiatan yang terukur dari pembiayaan APBD, Rencana program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan berdasarkan Permendagri No.900.1.15.5-1317 tahun 2023 untuk periode Tahun 2025 s/d 2026 sebanyak : 1 program penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 4 Program strategis, dengan 7 kegiatan penunjang, dan 9 kegiatan teknis dengan 42 sub kegiatan meliputi :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANKAB. LOMBOK TENGAH
TAHUN 2026**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								9.510.963.492,00							11.326.199.124,15	
	3							9.505.473.492,00							11.315.699.124,15	
	3	2						9.505.473.492,00							11.315.699.124,15	
1	3	2	0	1				5.693.343.038,00	Lombok Tengah	DAU /APB D Kabupaten	Transformasi tata kelola Daerah yang kreatif, inovatif,	Reformasi Birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan	ASN	100%	6.679.388.298,15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

				0																
						Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	12.667.430,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DAN ALO KASI UM UM (DAU)	Transformasi tata kelola Daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif	Reformasi Birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan	ASN	1 Berita Acara	42.160.890,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	2	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan yang Tersusun (Dokumen)	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	4.751.160.991,30	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DAN ALO KASI UM UM (DAU)	Transformasi tata kelola Daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif	Reformasi Birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan	ASN	19 Dokumen	4.894.015.011,00	
	3	2	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
					0															
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	602 org/bln	602 org/bln	602 org/bln	620 Orang/bulan	4.728.314.784,30	Kab. Lombok Tengah, Praya,	DAN ALO KASI	Transformasi tata kelola	Reformasi Birokrasi dan	ASN	602 org/bln	4.803.676.401,00	DINAS KELAUTAN	

						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	19 Laporan	19.556.510,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DAN ALO KASI UM UM (DAU)	Transformasi tata kelola Daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif	Reformasi Birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan	ASN	18 Laporan	81.175.350,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	2.		Administ rasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		-	0,00					-	-	36.000.000,00	
	3	2	0	2.	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
					0														
					0	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DAN ALO KASI UM UM (DAU)	Transformasi tata kelola Daerah yang kreatif, inovatif	Reformasi Birokrasi dan peningkatan tata kelola pemer	-		25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

	3	2	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi														
		5	1	0	0	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
				6	0															
				1	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.020.9 55,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DAN A ALO KASI UM UM (DA U)	Transf ormasi tata kelola Daera h yang kreatif , inovati f, adapti f dan kolabo ratif	Refor masi Birokra si dan pening katan tata kelola pemer intahan	ASN	1 Paket	12.296.4 07,20	DINA S KELA UTAN DAN PERIK ANA N	
	3	2	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		5	1	0	0															
				6	0															
				2	2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 paket	4 paket	4 paket	4 Paket	3.900.7 28,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DAN A ALO KASI UM UM (DA U)	Transf ormasi tata kelola Daera h yang kreatif , inovati f, adapti f dan kolabo ratif	Refor masi Birokra si dan pening katan tata kelola pemer intahan	ASN	6 Paket	15.750.0 00,00	DINA S KELA UTAN DAN PERIK ANA N	
	3	2	0	2.	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

		5	1	0	0															
				6	0		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DAN ALO KASUMUM (DAU)	Transformasi tata kelola Daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif	Reformasi Birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan	-		15.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		5	1	0	0															
				6	0		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DAN ALO KASUMUM (DAU)	Transformasi tata kelola Daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif	Reformasi Birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan	-		49.557.123,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
		5	1	0	0															

					Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							UM UM (DA U)	Daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif	peningkatan tata kelola pemerintahan				DAN PERIK ANA N	
	3	2	0	2.	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
		5	1	0	0						1 Unit	0,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DAN A ALO KASI UM UM (DA U)	Transformasi tata kelola Daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif	Reformasi Birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan	-	459.990.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIK ANA N
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan													
	3	2	0	2.	0	Pengadaan Mebel													
		5	1	0	0														
				7	0	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 unit	-	7 unit	1 Unit	24.833.620,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DAN A ALO KASI UM	Transformasi tata kelola Daerah	Reformasi Birokrasi dan peningkatan	ASN	3 unit	21.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN

												(DA U)	kreatif , inovati f, adapti f dan kolabo ratif	tata kelola pemer intahan				ANA N		
	3	2	0	2.	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		5	1	0	0															
				7	1					10	0,00									
					1		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DAN A ALO KASI UM UM (DA U)	Transf ormasi tata kelola Daera h yang kreatif , inovati f, adapti f dan kolabo ratif	Refor masi Birokra si dan pening katan tata kelola pemer intahan	-		24.500.0 00,00	DINA S KELA UTAN DAN PERIK ANA N	
	3	2	0	2.		Penyedi aan Jasa Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah	Laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan (Laporan)	60 Lapora n	12 Lapor an	12 lapor an	12 Lapor an	229.738 .998,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DAN A ALO KASI UM UM (DA U)	Transf ormasi tata kelola Daera h yang kreatif , inovati f, adapti	Refor masi Birokra si dan pening katan tata kelola pemer intahan	ASN	12 Lapor an	314.694. 000,00	DINA S KELA UTAN DAN PERIK ANA N

					0															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Transformasi tata kelola Daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif	Reformasi Birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan	-	10.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
2	3	2	0			PROGRA M PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	4518.88 ton	4058.43 ton		-	1.187.519.832,00					-	837.400.357,00		
	3	2	0	2.		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Volume hasil tangkapan ikan dari perairan darat yang tercatat (Ton)	3.133,66 Ton	550,11 TON	585,70 Ton	605,78 Ton	290.468.980,00	Bendungan Batu Jai (Kec.Praya Tengah, Praya dan Praya Barat serta DAM Pengge (Praya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif	Nelayan PUD	616,08 Ton	321.631.933,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

						yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota													Barat dan Praya Barat Daya)		bangsa melalui swase mbada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	dan Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia																
	3	2	0	2.	0	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																																
		5	3	0	1																																	
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	17.568.040,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALO KASUMUM (DAU)	Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkula	Nelayan PUD/Laut/KUBE	12 Dokumen	22.226.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		

							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	60 Unit/paket	9 unit/paket	12 unit/paket	4 Unit	188.112.708,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALO KASI UM UM (DAU)	Mema ntapka n sistem pertahan an keama nan negara dan mend orong keman dirian bangs a melalu i swase mbada panga n, energi, air, ekono mi kreatif , ekono mi hijau, dan ekono mi biru	PD-2 Transf ormasi Ekono mi Hijau, Ekono mi Biru, Ekono mi Sirkula r Yang Inklusif dan Berkel anjuta n PD3 - Aksele rasi Ekono mi Hijau dan Biru, Pengur angan Kemisk inan dan Pemer ataan Penda patan, Penge mbang an	Nelayan PUD/Laut/KUBE	12 unit/paket	263.085.047,00	DINA S KELA UTAN DAN PERIK ANA N
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------------	---------------	--------	----------------	---	--------------------------	---	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------

														Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
3	2	0	2.		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kelompok yang dibina(Kelompok)	260 kelompok	104 kelompok	115 Kelompok	26 Kelompok	824.082.162,00	Kec.Praya Barat Daya, Praya Barat, Pujut, Praya, Praya Tengah dan Praya Timur	DANA ALO KASUMUM (DAU)	Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, ekonomi kreatif	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya	Nelayan PUD/Laut/KUBE	238 kelompok	409.985.033,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

													air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Daya Saing Sumberdaya Manusia					
	3	2	0	2.	0	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha													
		5	3	0	0														
				2	0														
				0	3														
						Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi	55 unit usaha	22 unit usaha	20 unit usaha	9 Unit Usaha	12.601.402,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALO KASIH UMUM (DAU)	Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD1 - Peningkatan	Nelayan Laut/PUD/KUBE	10 unit usaha	11.025.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

													mbada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia					
3	2	0	2.		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang dikelola	1 unit	-	1 unit	1 unit	41.642.750,00	Kecamatan Pujut	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD1 - Peningkatan	Nelayan Laut/PUD/KUBE	1 unit	39.633.391,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

					yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
	3	2	0	2.	0	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT														
		5	3	0	0					260	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALO KASUMUM (DAU)	-	PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		33.075.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	2	0	2.		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang	Jumlah Kapal Perikanan ukuran sampai dengan 10 GT yang terdaftar (Unit/Dokumen)	1240 Unit/Dokumen	560 unit	260 unit	672 unit	31.325.940,00	Kab.Loteng	DAN ALO KASUMUM (DAU)	Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mend	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi	Nelayan Laut/PUD/KUBE	672 unit	33.075.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

						Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											orong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia					
	3	2	0	2.	0	Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)																	
		5	3	0	0																		
				6	0	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	1240 rekomendasi	260 rekomendasi	260 rekomendasi	200 Rekomendasi	31.325.940,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALO KASUMUM (DAU)	Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru,	Nelayan Laut/PUD/KUBE	250 rekomendasi	33.075.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				

														dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia					
3	3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	197.309,65 Ton	46.126,47 Ton	47.053,94 Ton	47.800,51 Ton	1.995.299.987,00	Kabupaten Lombok Tengah	DANA KASUMUM (DAU)	Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mend	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi	Pembudidayaan/Pokdakan	48.804,32 Ton	3.510.847.520,00	

													orong keman dirian bangs a melalu i swase mbada panga n, energi, air, ekono mi kreatif , ekono mi hijau, dan ekono mi biru	Sirkula r Yang Inklusif dan Berkel anjuta n PD1 - Pening katan Kualita s dan Daya Saing Sumbe rdaya Manus ia				
3	2	0	2.	Penerbit an Izin Usaha Perikana n di Bidang Pembudi dayaan Ikan yang Usahany a dalam 1 (Satu)	Jumlah Rekomendasi Dokumen Pelayanan Perijinan Perikanan Budidaya	-			11 doku men	0,00			Mema ntapka n sistem pertah anan keama nan negara dan mend orong keman	PD-2 Transf ormasi Ekono mi Hijau, Ekono mi Biru, Ekono mi Sirkula r Yang	-	-	18.000.0 00,00	

									2	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------	---	------------------------	---	---	---	--	---------------	------------------------------

3	2	0	2.		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	peningkatan kapasitas pembudidaya ikan kecil (Kelompok)	173 Pokdakan	-	6 kelompok	27 Kelompok	78.110.856,00	Kabupaten Lombok Tengah	DAN ALO KASUMUM (DAU)	Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pembangunan	Pembudidaya Ikan	31 pokdakan	60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
---	---	---	----	--	--------------------------------------	---	--------------	---	------------	-------------	---------------	-------------------------	-----------------------	---	--	------------------	-------------	---------------	------------------------------

													air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
	3	2	0	2.	0	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha													
		5	4	0	0														
				2	0														
				0	3														
						Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				6 Kelompok	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	-	Pembudidaya Ikan		6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

						Daerah Kabupaten/Kota														
	3	2	0	2.	0	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
		5	4	0	0															
				3	0					600	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DAN A ALO KASI UM UM (DA U)	-	-	-		6.000.00 0,00	DINA S KELA UTAN DAN PERIK ANA N	
	3	2	0	2.		Pengelolaan Pembudi dayaan Ikan	Peningkatan volume produksi ikan hasil kegiatan pembudidayaan (Ton)	3728,8 0 Ton	987,2 5 Ton	1.915 ,72 Ton	723,7 2 ton	1.917.1 89.131, 00	Kabupat en Lombok Tengah	DAN A ALO KASI UM UM (DA U)	Mema ntapka n sistem pertah anan keama nan negara dan mend orong keman dirian bangs a melalu i	PD-2 Transf ormasi Ekono mi Hijau, Ekono mi Biru, Ekono mi Sirkula r Yang Inklusif dan Berkel anjuta n	Pembudidaya Ikan	734,5 8 Ton	3.426.84 7.520,00	DINA S KELA UTAN DAN PERIK ANA N

						Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2 Dokumen	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALO KASI UM UM (DAU)	Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pembudidayaan Ikan		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	2	0	2.	0	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
5	4	0	0	0														

			4	0															
				2						14	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALO KASI UM UM (DAU)	Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pembudidaya Ikan		660.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

3	2	0	2.	Pengaw asan Sumber Daya Perikana n di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genanga n Air Lainnya yang Dapat Diusaha kan Dalam Kabupat en/Kota	Tingkat Pelanggaran Pemanfaatan sumberdaya KP	100%	100%	100%	100%	39.800. 008,00	Kec.Pray a Barat Daya/Pr aya Barat/P ujut/Pra ya Timur/P raya Tengah dan Praya .	DAN A ALO KASI UM UM (DA U)	Mema ntapka n sistem pertah anan keama nan negara dan mend orong keman dirian bangs a melalu i swase mbada panga n, energi, air, ekono mi kreatif , ekono mi hijau, dan ekono mi biru	PD-2 Transf ormasi Ekono mi Hijau, Ekono mi Biru, Ekono mi Sirkula r Yang Inklusif dan Berkel anjuta n PD3 - Aksele rasi Ekono mi Hijau dan Biru, Pengur angan Kemisk inan dan Pemer ataan Penda patan, Penge mbang an	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	100%	44.000.0 00,00	DINA S KELA UTAN DAN PERIK ANA N
---	---	---	----	---	--	------	------	------	------	-------------------	---	--	---	---	---	------	-------------------	---

													air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
	3	2	0	2.	0	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota													
		5	5	0	0														
				1	0														
				6	0														
						Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	75 pelaku usaha	-	-	15 Pelaku Usaha	9.999.880,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALO KASI UM UM (DAU)	Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkula	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	15 Pelaku usaha	11.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

													air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						
5	3	2	0			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1. Produksi olahan hasil perikanan dan 2. Produksi Garam Rakyat (TON)	25485,90 Ton 13082,26 Ton	4834,23 Ton 3815,21 ton	4863,97 Ton 3613,53 Ton	4970,54 Ton 2554,48 Ton	589.510.627,00	Kabupaten Lombok Tengah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkel	Poklhasar	5040,21 Ton 2580,03 Ton	244.062.949,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

3	2	0	2.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Periklanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah TDUP-HP yang diterbitkan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	19.999.950,00	Kabupaten Lombok Tengah	DAN ALO KASUMUM (DAU)	Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkelanjutan PD3 - Akselerasi Ekonomi Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pembangunan	Poklalsar	12 Dokumen	21.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
---	---	---	----	--	---------------------------------	------------	------------	------------	------------	---------------	-------------------------	-----------------------	---	---	-----------	------------	---------------	------------------------------

													air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
3	2	0	2.		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan stock (Ton)	271.101,28 Ton	50.183,90 Ton	50.492,63 Ton	52.024,73 Ton	569.510.677,00	Kabupaten Lombok Tengah	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	PD-2 Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif dan Berkel	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	53.100,35	223.062.949,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

													air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hijau dan Biru, Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						
	X					NON URUSAN					5.490.000,00							10.500.000,00		
	X	X	X			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					5.490.000,00								10.500.000,00	
6	X	X	X	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	5.490.000,00	Praya	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Transformasi tata kelola Daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan	Reformasi Birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan	ASN	100%	10.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB V. PENUTUP

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

- ✚ Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Terdapat 4 Program yaitu 1 Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 3 Program Strategis dengan 6 kegiatan Penunjang serta 10 Kegiatan Teknis dengan 42 Sub Kegiatan.
- ✚ Penyesuaian dan penambahan nama sub kegiatan baru yang akan dilaksanakan tahun 2026 (terutama dengan keluarnya pmutakhiran Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 pengganti KEPMENDAGRI Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diikuti dengan penyesuaian target
- ✚ Pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan KEPMENDAGRI Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 terjadi pengurangan capaian target kegiatan dan diikuti oleh penurunan anggaran indikatif hal ini disebabkan beberapa item pekerjaan berpindah ke Kegiatan Pemberdayaan nelayan kecil di subkegiatan SubKegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Keci termasuk program kemiskinan.
- ✚ Pada sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap terjadi penambahan target capaian kinerja hal ini berdasarkan keluarnya KEPMENDAGRI Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

- ✚ Pada Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota terjadi penambahan indikator kinerja nya dari 2 indikator menjadi 3 indikator kinerja nya hal ini di sebabkan karena keluarnya KEPMENDAGRI Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.
- ✚ Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil terjadi penurunan target kinerja dan anggaran hal ini terjadi karena keluarnya KEPMENDAGRI Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 sehingga untuk program kemiskinan dan asuransi nelayan di alihkan ke sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Keci (Kegiatan Baru).
- ✚ Pada Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan Yang Usahnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terjadi pengurangan anggaran hal ini terjadi karena Penyesuaian pagu indikatif tahun 2025 karena Keterbatasan anggaran.
- ✚ Untuk SubKegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan pendanaan Pembiayaan, Kemitraan Usaha dan SubKegiatan Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terjadi penghapusan anggaran hal ini terjadi karena Keterbatasan Anggaran, untuk mengatasi hal tersebut pihak dinas bekerja sama dengan Lembaga Keuangan (LPMUKP)/ KKP-RI.

- ✚ Pada Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 daerah Kabupaten/Kota terjadi pengurangan anggaran dari Rp.5.000.000,- menjadi Rp.0,- hal ini karena penyesuaian pagu indikatif dan keterbatasan anggaran.
- ✚ Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya Ikan Kecil sebesar Rp25.000.000 dinolkan karena keterbatasan anggaran dan penyesuaian pagu indikatif , namun target tetap dilaksanakan melalui koordinasi dengan PPL dan enumerator.
- ✚ Pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang semula berdasarkan KEPMENDAGRI nomor 050-3708 tahun 2020 untuk Kabupaten/Kota memiliki 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan sekarang berubah setelah keluarnya pmutakhiran Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 menjadi 2 Kegiatan dengan 3 Sub Kegiatan .
- ✚ Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdapat penambahan subkegiatan yaitu SubKegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, yang tahun-tahun sebelumnya tidak pernah dianggarkan dan tahun 2026 dianggarkan hal ini bertujuan 1). Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan Program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan -RI serta Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTB ; 2) Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah; 3) Menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; 4) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah.
- ✚ Terdapat penambahan subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD di Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tahun sebelumnya tidak pernah dianggarkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan

Renja tahun 2026 ini akan menjadi acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan tupoksinya dengan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Renja Tahun 2026 di arahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
2. Dalam melaksanakan Renja, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Bidang dan Sekertaris serta Kasubag Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah
3. Penyusunan Renja ini berpedoman dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dan RPMJD serta RKPD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026.

c. Rencana tindak lanjut

- 1) Untuk Keterbatasan ketersediaan anggaran maka dilakukan melalui sinergitas yang memiliki program/kegiatan yang sama baik dengan NGO, pemerintah pusat dalam hal ini KKP-RI maupun dengan Propinsi dan Instansi terkait.
- 2) Capaian Target kinerja Tahun 2025 akan ditindak lanjuti dengan berpedoman kepada Peraturan – peraturan Daerah tentang pengelolaan kelautan dan perikanan serta aturan – aturan mengikat lainnya yang dijadikan dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan harapan adanya sinergritas antara program dan kegiatan yang menjadi prioritas pelaksanaan dari

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan dalam pelaksanaan pembelanjaan anggaran harus sesuai dengan aturan pengelolaan anggaran yang berlaku.

Praya Oktober 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Lombok Tengah



H. NURJAHMAN, SP,MM

NIP. 19681231 199710 005